

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kawasan Rawan Bencana

Gambaran umum dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik Kota Padang. Penjelasan gambaran umum meliputi wilayah administrasi dan karakteristik fisik dasar seperti topografi, geologi dan oseanografi yang mencakup lokasi rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Wilayah Pantai Barat Kota Padang dan lokasi keinginan pindah.

4.1.1 Wilayah Administrasi Kota Padang

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di Pesisir Pantai Barat Sumatera Barat dengan luas keseluruhan adalah 694,96 Km², terletak pada 100⁰05'05"BT-100⁰34'09"BT dan 00⁰44'00"LS-01⁰08'35"LS. Kota Padang memiliki administrasi (**Gambar 1.1**).

- Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur : Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat : Selat Mentawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 694,96 Km². Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam 11 kecamatan dengan 193 kelurahan. Kota Padang merupakan salah satu kota di Pantai Barat Sumatera yang sangat rawan bencana gempa dan tsunami. Peta rawan tsunami yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang Tahun 2010 (**Gambar 4.9**) menjelaskan bahwa Wilayah Pantai Barat Kota Padang sebagai lokasi sangat rawan terhadap bencana tsunami (ditunjukkan dengan warna merah pada peta). Lokasi rawan bencana tsunami yang kemudian menjadi area studi penelitian yang terdiri dari tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Padang Selatan, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Koto Tangah.

4.1.2 Karakteristik Fisik Dasar

A. Topografi

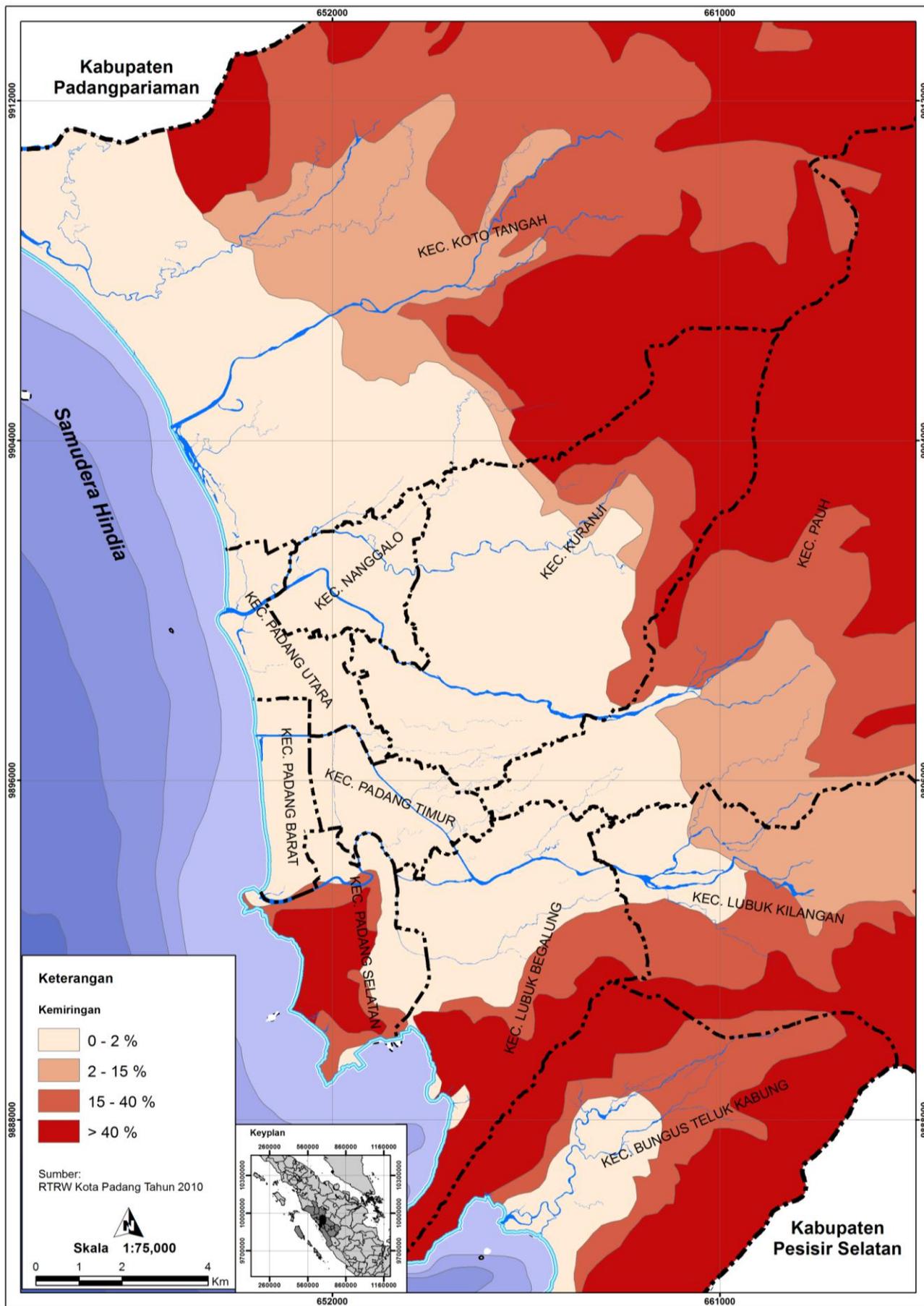
Berdasarkan posisi wilayah, Kota Padang memiliki ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, karena memiliki topografi yang bervariasi dengan perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang curam. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi yaitu 0 meter dpl sampai > 1.000 meter dpl, diantaranya (RTRW Kota Padang, Tahun 2010-2030):

1. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 0-2% umumnya terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo dan sebagian Kecamatan Kuranji, Padang Selatan, Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tengah.
2. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 2-15% tersebar di Kecamatan Koto Tengah, Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada bagian tengah Kota Padang.
3. Kawasan dengan kelerengan lahan 15%-40% tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tengah.
4. Kawasan dengan kelerengan lahan >40% tersebar di bagian timur Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh dan bagian selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung.

Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kelerengan lahan rata-rata >40% (**Gambar 4.1**). Kecamatan yang berada pada kelerengan >40% sangat berisiko terjadi bencana longsor di musim penghujan dan jika terjadi bencana gempa bumi. Sementara itu daerah dengan kemiringan lereng 0-2% merupakan daerah yang rawan terhadap bencana tsunami.

B. Geologi

Secara geologis Kota Padang dibentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Wilayah Kota Padang terdiri dari 7 (tujuh) jenis tanah yang tersebar di seluruh wilayah, dengan jenis tanah terluas adalah jenis tanah latosol mencapai 46,7%. Secara umum daya dukung ketujuh batuan bervariasi dari yang rendah sampai tinggi. Adapun jenis batuan tersebut adalah aliran yang tak teruraikan (Qtau), alluvium (Qal), kipas alluvium (Qt), tufa kristal (QTt), andesit (Qta) dan tufa (QTp), batu gamping (PTIs) dan filit, batu pasir, batu lanau meta (PTps). Bencana gempa bumi akan mengakibatkan dampak pada tatanan geologi seperti longsor dan aliran lumpur gangguan kekacauan pada sirkulasi air tanah dan gerakan tanah.



Gambar 4.1 Peta Kelerangan Kota Padang

C. Oseanografi

Kota Padang memiliki garis pantai wilayah ± 84 Km dengan luas kewenangan pengelolaan perairan ± 72.000 Ha dan 19 pulau-pulau kecil. Secara fisik administratif terdapat tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai yaitu Kecamatan Koto Tengah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Nanggalo dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kondisi ini mengakibatkan wilayah Kota Padang rawan terhadap bencana alam dari laut, seperti gelombang tsunami, erosi pantai oleh gelombang laut dan banjir. Bencana alam dari laut berkaitan erat dengan proses-proses yang terjadi di laut.

4.1.3 Peruntukan Lahan

Dalam rentang waktu antara 2009 hingga 2014 (5 tahun) di Kota Padang telah menunjukkan indikasi perluasan pembangunan ke arah timur dan utara (Fitriawan, 2011). Hal ini dapat dibuktikan melalui interpretasi citra landsat ETM 7 *multi temporal* tahun 2008 dan citra landsat L8 tahun 2014 (**Gambar 4.2** dan **Gambar 4.3**). Interpretasi yang dilakukan hanya untuk melihat perubahan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun di Kota Padang dalam waktu lima tahun terakhir (sebelum gempa dan setelah gempa). Pada tahun 2008 (sebelum gempa), luasan lahan tidak terbangun di Kota Padang didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, hutan, sawah dan tanah kosong sebesar 52.469,09 Ha (**Tabel 4.1**). Sedangkan untuk luasan lahan terbangun di Kota Padang pada tahun 2008 adalah sebesar 16.616,81 Ha yang tersebar pada wilayah barat Kota Padang (**Gambar 4.2**). **Tabel 4.1** menunjukkan perbedaan luas lahan terbangun dan lahan tidak terbangun pada masing-masing kecamatan di Kota Padang.

Tabel 4.1 Perbedaan Luas Lahan Terbangun dan Tidak Terbangun per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2008 dan 2014

No.	Kecamatan	Luas Lahan Terbangun (Ha)		Luas Lahan Tidak Terbangun (Ha)	
		Tahun 2008	Tahun 2014	Tahun 2008	Tahun 2014
1.	Bungus Teluk Kabung	958,85	1.768,72	7.367,67	6.572,99
2.	Lubuk Kilangan	1.844,9	1.670,84	6.570,07	6.748,35
3.	Lubuk Begalung	1.370,14	1.603,44	1.693,92	1.463,35
4.	Padang Selatan	549,41	713,35	716,76	556,16
5.	Padang Timur	816,42	824,84	44,53	36,11
6.	Padang Barat	530,46	540,33	10,02	1,02
7.	Padang Utara	722,06	810,21	108,47	20,97
8.	Nanggalo	656,61	686,44	219,53	189,69
9.	Kuranji	2.803,76	2.910,67	2.550,59	2.443,68
10.	Pauh	1.985,73	2.086,22	14.551,46	14.454,71
11.	Koto Tengah	4.378,47	6.747,56	18.636,08	16.276,28
Kota Padang		16.616,81	20.362,62	52.469,09	48.763,31

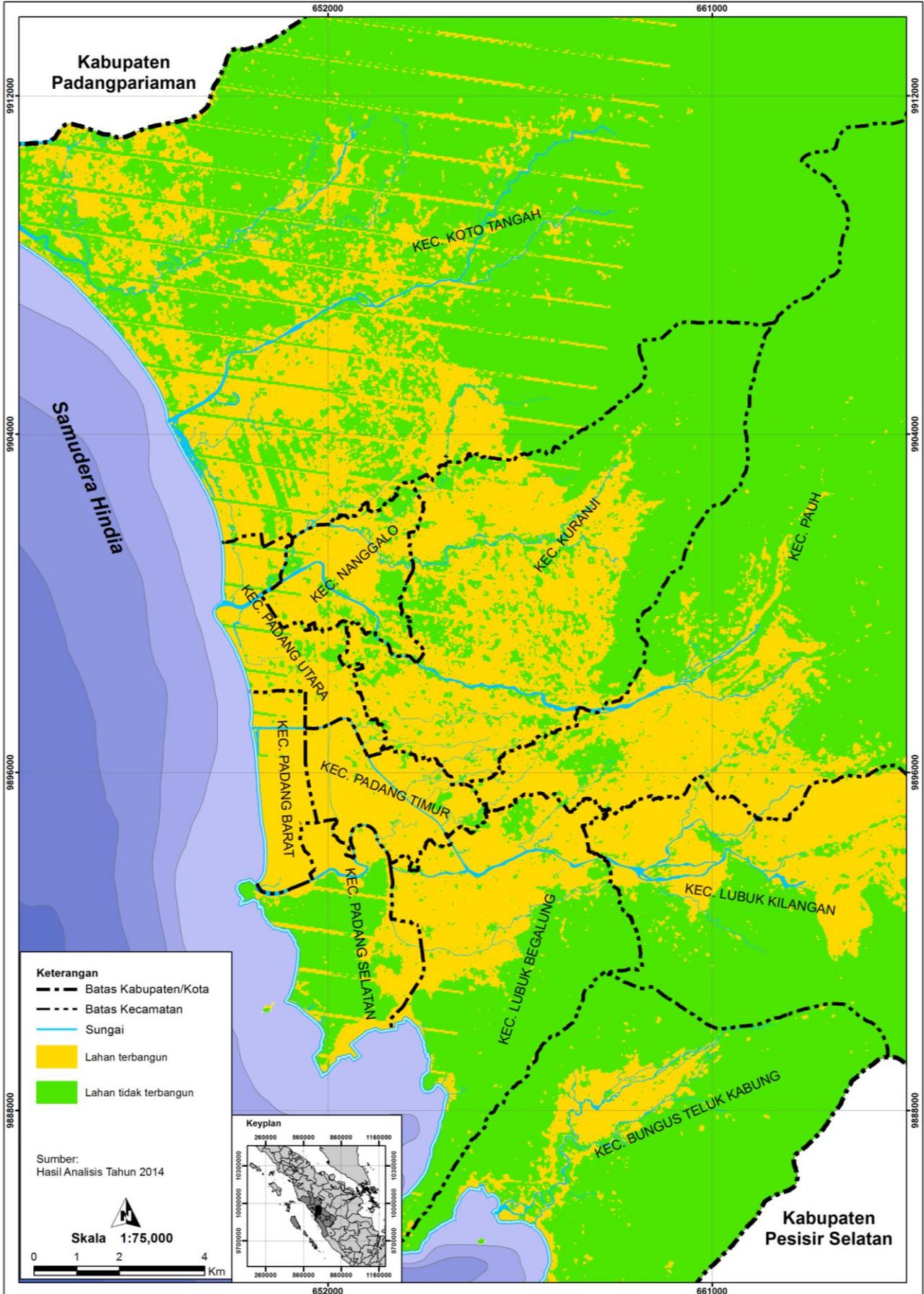
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.2 Peruntukan Lahan di Kota Padang pada saat Sebelum dan Setelah Gempa

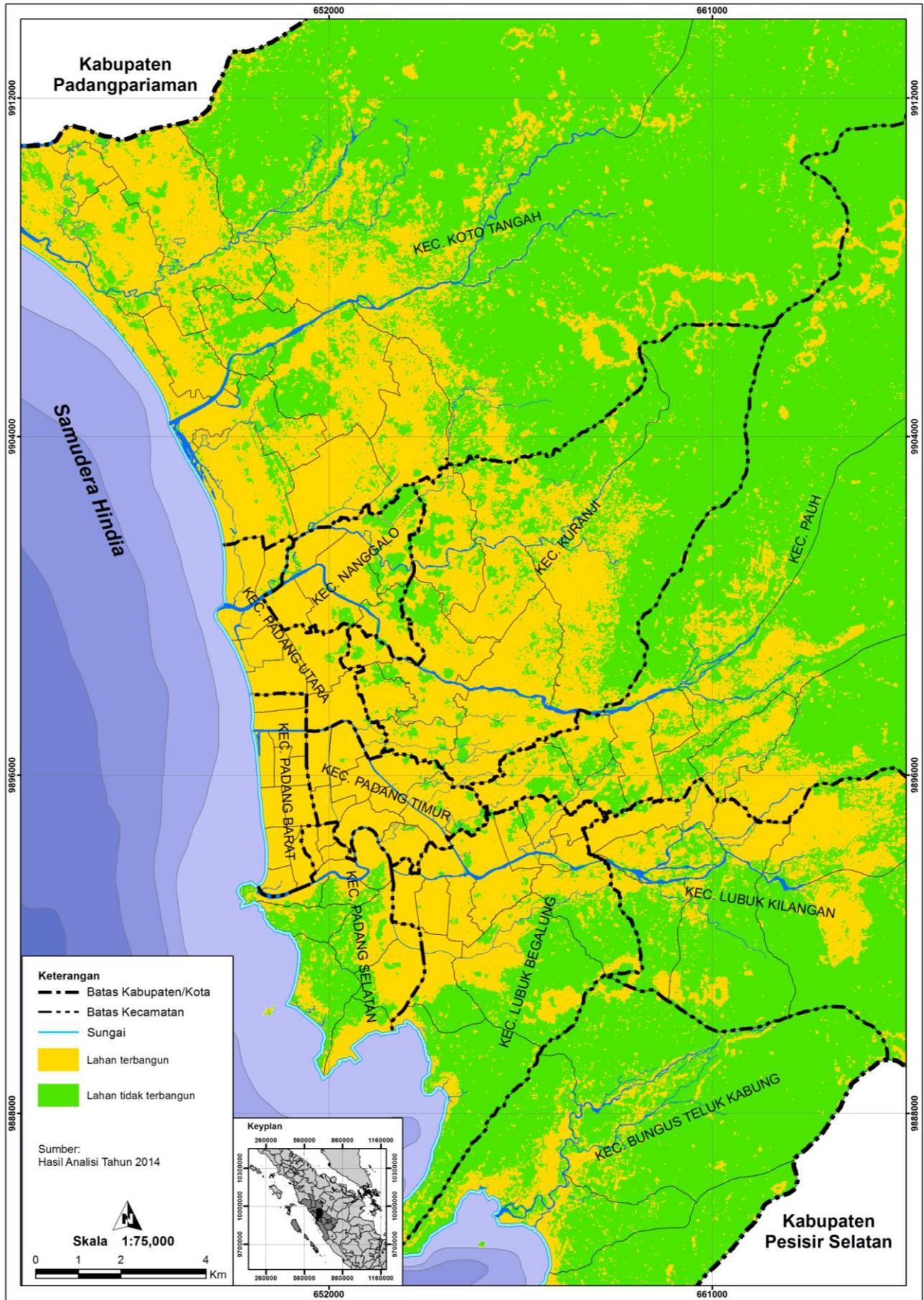
Perbedaan	Sebelum Gempa Tahun 2008 (Gambar 4.2)	Setelah Gempa Tahun 2014 (Gambar 4.3)
Lahan terbangun	Pada saat sebelum gempa luasan lahan terbangun di Kota Padang hanya sebesar 16.616,81 Ha yang tersebar pada wilayah barat Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tengah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur dan Kecamatan Kuranji	Adanya perkembangan jumlah penduduk di Kota Padang yang tumbuh sebesar 1,14% per tahun menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat pada tahun 2014. Selain itu pasca gempa bumi banyak bangunan-bangunan di Kota Padang yang mengalami kerusakan dan relokasi bangunan, sehingga terjadi penambahan lahan terbangun untuk kegiatan perkotaan sebesar 20.362,62 Ha. Perkembangan terjadi ke daerah pinggiran bagian timur dan utara Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Lahan tidak terbangun	Pada saat sebelum gempa peruntukan lahan di Kota Padang didominasi oleh kegiatan pertanian, perkebunan, hutan, sawah dan tanah kosong sebesar 52.469,09 Ha	Pada tahun 2014 terjadinya penambahan fungsi ruang untuk kegiatan perkotaan, sehingga lahan tidak terbangun di Kota Padang mengalami pengurangan sebesar 48.763,31 Ha

Sumber : Hasil Analisis, 2014

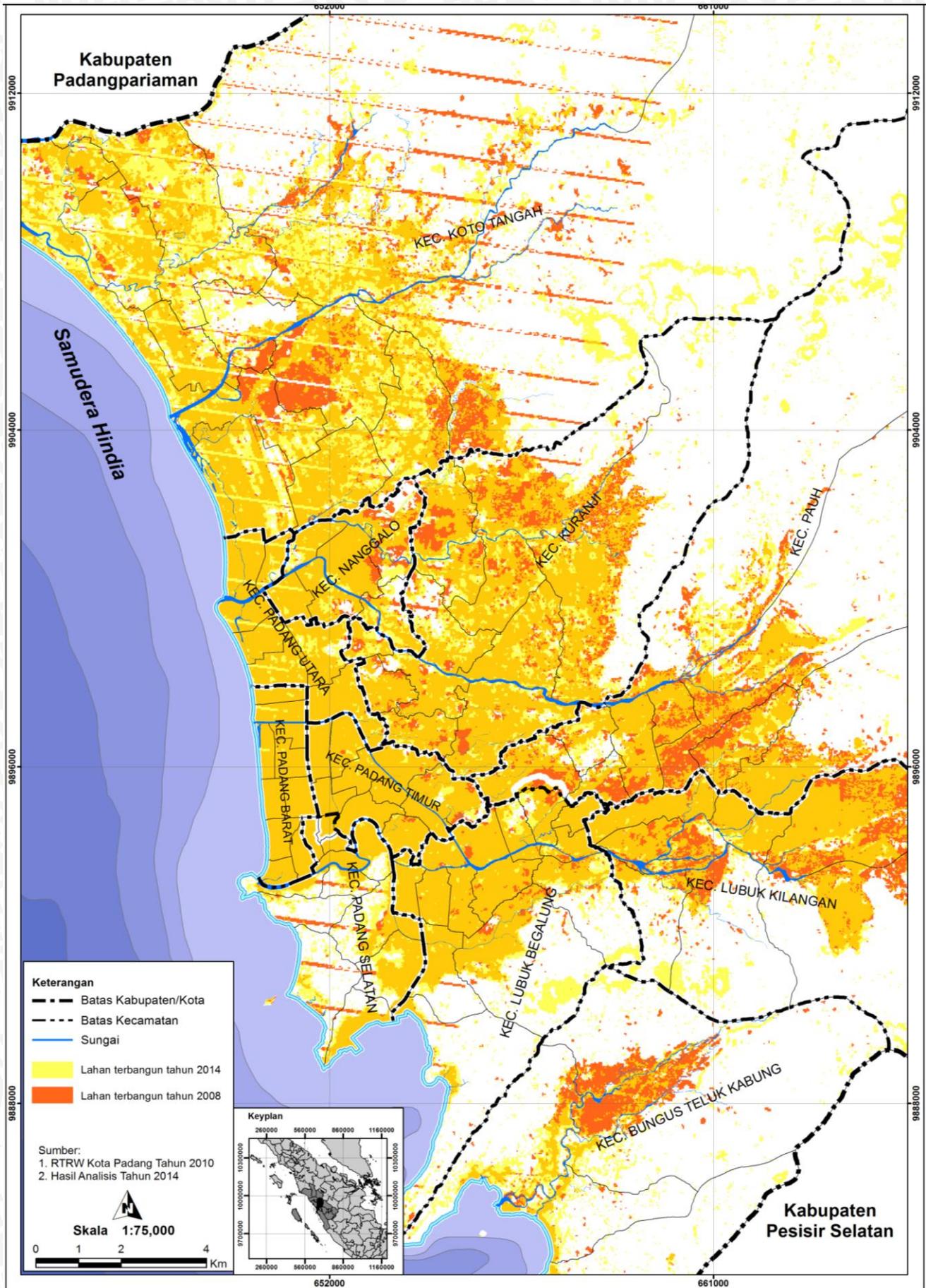
Tabel 4.1 dan **Tabel 4.2** menunjukkan bahwa adanya perubahan peruntukan lahan di Kota Padang pada saat sebelum dan setelah gempa yang terjadi tahun 2009. Perkembangan peruntukan lahan yang terjadi pada tahun 2014 di Kota Padang disebabkan adanya penambahan penduduk yang tiap tahun tumbuh sekitar 1,14% per tahun (RTRW Kota Padang, 2010-2030). Dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun akan menyebabkan aktivitas penduduk juga meningkat sehingga membutuhkan lahan terbangun untuk permukiman (Lestari, 2009). Selain itu perubahan peruntukan lahan di tahun 2014 juga merupakan implikasi secara fisik dari bencana gempa bumi tahun 2009 yang mengakibatkan banyaknya bangunan yang mengalami penambahan dan perubahan fungsi seperti permukiman, pendidikan, pemerintahan dan perdagangan jasa. **Tabel 4.1** menunjukkan bahwa pada tahun 2014, luas lahan terbangun (perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran) di Kota Padang mengalami peningkatan sebesar 20.362,62 Ha yang ditunjukkan dengan warna merah pada **Gambar 4.4**. Luas tersebut berkembang ke daerah pinggiran bagian timur dan utara Kota Padang diantaranya Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Sementara itu, lahan tidak terbangun mengalami pengurangan luas lahan sebesar 48.763,31 Ha (**Gambar 4.4**).



Gambar 4.2 Peruntukan Lahan di Kota Padang Tahun 2008



Gambar 4.3 Peruntukan Lahan di Kota Padang Tahun 2014



Gambar 4.4 Overlay Peruntukan Lahan Terbangun Tahun 2008 dan 2014

4.1.4 Karakteristik Kependudukan

Pada saat sebelum terjadi gempa pada tahun 2009, penduduk Kota Padang berjumlah 875.750 jiwa (**Tabel 4.3**). **Tabel 4.3** menunjukkan pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Padang mengalami penurunan yang dindikasikan sebagai dampak dari bencana gempa bumi pada tahun 2009 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 383 jiwa, korban luka berat sebanyak 431 jiwa dan korban luka ringan sebanyak 771 jiwa (Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang, 2014-2018).

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2008-2014

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2008	838.190
2.	2009	856.815
3.	2010	875.750
4.	2011	833.562
5.	2012	844.316
6.	2013	854.336
7.	2014	876.678

Sumber : BPS Kota Padang

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah penduduk Kota Padang mayoritas berdomisili di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 174.567 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 23.858 jiwa. Sebanyak 174.283 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Padang merupakan penduduk yang berada di kawasan bahaya tsunami yang tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo.

Tabel 4.4 Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas Daerah Aera (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Bungus Teluk Kabung	100,78	23.858	230
2.	Lubul Kilangan	85,99	51.847	579
3.	Lubuk Begalung	30,91	113.217	3.495
4.	Padang Selatan	10,03	58.780	5.721
5.	Padang Timur	8,15	78.789	9.562
6.	Padang Barat	7,00	45.781	6.580
7.	Padang Utara	8,08	70.051	8.574
8.	Nanggalo	8,07	59.137	7.154
9.	Kuranji	57,41	135.787	2.244
10.	Pauh	146,29	64.864	414
11.	Koto Tangah	232,25	174.567	713
Padang		694,96	876.678	1.215

Sumber : BPS Kota Padang

Kepadatan penduduk rata-rata Kota Padang pada tahun 2014 adalah sebesar 1.215 jiwa/Km² (**Tabel 4.4**). Kecamatan dengan rata-rata kepadatan tinggi berada pada bagian pusat kota yaitu Kecamatan Padang Timur (9.562 jiwa/km²), Kecamatan Padang Utara

(8.574 jiwa/km²) dan Kecamatan Nanggalo (7.154 jiwa/km²). Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk masih terpusat di pusat kota karena sarana dan prasarana yang lengkap. Wilayah kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk rendah berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 230 jiwa/km² dan Kecamatan Pauh sebanyak 414 jiwa/km².

4.1.5 Fasilitas Perkotaan

A. Fasilitas pendidikan

Di Kota Padang ketersediaan fasilitas pendidikan terdiri dari sarana pendidikan pra-sekolah (Taman Kanak-Kanak), sarana pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah), sarana pendidikan menengah (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah), sarana pendidikan atas (Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah) dan sarana pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik dan Akademi). Berikut **Tabel 4.5** menunjukkan jumlah sarana pendidikan di Kota Padang pada tahun 2014.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Padang Tahun 2014

No.	Kecamatan	TK	SD	MI	SLTP	MTs	SMU	SMK	MA
1.	Bungus TL. Kabung	4	19	0	2	2	2	0	0
2.	Lubuk Kilangan	18	22	0	9	0	3	1	0
3.	Lubuk Begalung	27	39	1	4	2	3	3	1
4.	Padang Selatan	14	37	2	11	0	5	3	0
5.	Padang Timur	32	46	0	14	2	6	11	1
6.	Padang Barat	20	37	0	10	0	13	9	0
7.	Padang Utara	24	37	1	6	2	11	4	1
8.	Nanggalo	16	23	0	5	0	4	1	0
9.	Kuranji	25	55	3	6	3	4	1	2
10.	Pauh	11	24	2	4	2	5	1	1
11.	Koto Tengah	63	63	2	10	6	8	2	4
TOTAL		254	402	11	81	19	64	36	10

Sumber : BPS Kota Padang

Dampak dari bencana gempa bumi tahun 2009 telah mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum di Kota Padang termasuk salah satunya adalah fasilitas pendidikan (Dokumen Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2010). Pasca gempa mengharuskan Kota Padang secepatnya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan pendidikan. Salah satu kebijakan yang direncanakan pemerintah dari pokok kebijakan untuk sarana pendidikan adalah pembangunan *shelter*. Pembangunan *shelter* dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di dekat pantai seperti Kecamatan Padang Utara dan Padang Barat (**Gambar 4.5**). Hal ini sebagai bentuk pembangunan kembali prasarana dan sarana pendidikan sekolah yang rusak.



Gambar 4.5 Bangunan *Shelter* di SMAN 1 Kota Padang

B. Fasilitas kesehatan

Kota Padang memiliki berbagai jenis sarana kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga klinik kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Padang sebanyak 545 unit yang terdiri dari rumah sakit umum, puskesmas/pembantu, rumah sakit bersalin, klinik, posyandu dan klinik KB. **Tabel 4.6** menunjukkan secara kuantitatif jumlah sarana kesehatan di Kota Padang pada tahun 2014. Dari berbagai jenis sarana kesehatan yang tersebar di Kota Padang, posyandu merupakan jenis sarana kesehatan yang paling banyak dengan jumlah 102 unit. Untuk keberadaannya, Padang Timur dan Koto Tangah merupakan kecamatan yang memiliki jenis sarana kesehatan terbanyak di Kota Padang.

Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Padang Tahun 2014

No.	Kecamatan	RSU	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	RS Bersalin	Klinik/Balai Pengobatan	Posyandu	Klinik KB
1.	Bungus TL. Kabung	2	1	4	0	0	7	4
2.	Lubuk Kilangan	0	1	3	0	3	7	3
3.	Lubuk Begalung	0	2	7	0	4	14	8
4.	Padang Selatan	0	3	6	0	7	12	8
5.	Padang Timur	5	1	8	4	6	10	13
6.	Padang Barat	13	1	6	4	1	7	7
7.	Padang Utara	4	3	4	1	7	10	5
8.	Nanggalo	0	2	3	0	0	6	5
9.	Kuranji	2	3	4	0	2	9	8
10.	Pauh	0	1	5	0	0	9	6
11.	Koto Tangah	1	2	12	1	5	13	13
TOTAL		27	20	62	10	35	102	80

Sumber : BPS Kota Padang

Pasca gempa bumi 2009 sarana kesehatan di Kota Padang mengalami kerusakan fasilitas layanan kesehatan mencakup kerusakan bangunan, rusak dan hancurnya peralatan dan obat-obatan akibat guncangan gempa. Fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan fisik pasca gempa di Kota Padang yaitu 1 unit Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Djamil Padang (sebagian bangunan roboh) dan 2 unit rumah sakit swasta rusak berat (RS Selasih dan RS Bensi).

C. Fasilitas peribadatan

Kota Padang memiliki enam jenis fasilitas peribadatan yaitu masjid, mushalla, langgar, kelenteng, gereja dan pura/wihara. Oleh karena berpenduduk mayoritas muslim, ketersediaan fasilitas peribadatan di Kota Padang lebih didominasi oleh masjid dan mushalla yaitu masing-masing sebanyak 627 unit dan 770 unit (**Tabel 4.7**).

Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2014

No.	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Langgar	Kelenteng	Gereja	Pura/ Wihara
1.	Bungus TL. Kabung	14	42	3	0	0	0
2.	Lubuk Kilangan	33	61	22	0	0	0
3.	Lubuk Begalung	73	77	5	0	0	0
4.	Padang Selatan	39	36	29	1	1	2
5.	Padang Timur	56	48	0	0	1	0
6.	Padang Barat	43	37	18	0	5	2
7.	Padang Utara	51	37	0	0	0	0
8.	Nanggalo	41	35	0	0	0	0
9.	Kuranji	88	61	3	0	0	0
10.	Pauh	41	134	10	0	0	0
11.	Koto Tengah	148	202	149	0	1	0
TOTAL		627	770	239	1	7	4

Sumber : BPS Kota Padang

Pasca gempa bumi tahun 2009, fasilitas peribadatan di Kota Padang mengalami kerusakan pada kubah masjid dan gereja serta retak di sekitar bangunan. Jumlah kerusakan sarana peribadatan di Kota Padang pasca gempa yaitu 238 unit rusak berat, 211 unit rusak sedang dan 169 unit rusak ringan (Dokumen Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, 2010).

4.2 Kajian Kebencanaan

Kota Padang memiliki potensi bencana alam yang beragam diantaranya bencana gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, abrasi dan bencana-bencana lingkungan (RTRW Kota Padang 2010-2030). Penelitian lebih difokuskan pada kajian bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang.

4.2.1 Gempa Bumi

Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya termasuk Daerah Rawan Gempa bumi Indonesia No.III (RTRW Kota Padang 2010-2030). Gempa bumi yang terjadi di seluruh Provinsi Sumatera secara umum merupakan gempa tektonik oleh aktivitas zona penunjaman yang terdapat di laut dan sesar aktif di darat maupun di laut. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak (Zoning Regulasi Daerah Rawan Gempa, 2011). Intensitas Gempa bumi (MMI atau *Mercalli Modify Intensity*) Kota Padang mempunyai tingkat kegempaan berkisar antara V-VII (skala MMI), yaitu:

1. Skala V-VI : tersebar dominan ke bagian barat laut-tenggara yang meliputi daerah bagian tengah hingga timur laut Kota Padang.
2. Skala VI-VII : tersebar mulai dari bagian barat laut-tenggara, bagian tengah meliputi daerah Pasir Jambak, Cupak hingga ke arah tenggara Kota Padang.

Data kegempaan dari BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) dan USGS (*United States Geological Survey*) memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di Wilayah Pantai Barat Kota Padang tersebar secara merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan Pulau Sumatera. **Gambar 4.7** menunjukkan bahwa Kota Padang memiliki tiga jenis gempa bumi yaitu warna hijau untuk gerakan batuan, warna kuning untuk kawasan rawan gempa dan warna merah untuk kawasan rawan gerakan tanah. Untuk kawasan yang berada di Wilayah Pantai Barat Kota Padang, bencana gempa bumi dapat memicu terjadinya bencana tsunami karena memiliki pantai sangat landai >5%. Sedangkan kawasan rawan gerakan tanah berada pada kawasan perkotaan diantaranya adalah Kecamatan Nanggalo, Pauh, Kuranji, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Kecamatan Koto Tangah yang memiliki risiko potensi bencana gempa bumi.



Gambar 4.6 Dampak Gempa Bumi pada Tahun 2009 di Kota Padang

Gempa bumi yang terjadi di Wilayah Pantai Barat Kota Padang pada 30 September 2009, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang cukup besar bagi Kota Padang.

Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan pasca gempa bumi tahun 2009 di Kota Padang adalah Hotel Ambacang (**Gambar 4.6**). Sebanyak 200 tamu Hotel Ambacang di Kota Padang tertimbun dalam reruntuhan bangunan akibat gempa berkekuatan 7,6 skala *richter* yang mengguncang Sumatera Barat.

4.2.2 Tsunami

Wilayah Kota Padang terletak di *Megathrust* Mentawai yang sangat berpotensi menimbulkan bencana tsunami (RTRW Kota Padang, 2010-2030). Keberadaan Kota Padang yang berbatasan langsung dengan laut terbuka dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Kota Padang sebagai salah satu kota paling rawan terhadap gelombang tsunami. Oleh karena itu konsep mitigasi bencana tsunami yang perlu diterapkan di Kota Padang ditentukan berdasarkan kondisi topografi dan morfologi wilayah.

Daerah dengan kemiringan lereng antara 0-2% di wilayah Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tengah dan sebagian Kecamatan Kuranji merupakan daerah yang rawan tsunami. Untuk itu secara keseluruhan daerah ini memiliki potensi relatif kecil sebagai lokasi evakuasi warga. Pada kemiringan lereng 2-5% merupakan daerah yang relatif aman sebagai lokasi evakuasi tsunami yaitu Kecamatan Koto Tengah, Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan (**Tabel 4.8**).

Tabel 4.8 Wilayah Daerah Tsunami Berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kemiringan Lereng	Kecamatan	Keterangan
1.	0-2%	Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, Padang Selatan, Lubuk Begalung, Koto Tengah dan sebagian Kecamatan Kuranji	Kawasan yang memiliki potensi relatif kecil sebagai lokasi evakuasi warga, sehingga diperlukan adanya perencanaan transportasi untuk memberikan akses yang aman dari tsunami
2.	2-5%	Koto Tengah, Pauh dan Lubuk Kilangan	Daerah yang relatif aman untuk dimanfaatkan sebagai lokasi evakuasi tsunami.
3.	15-40%	Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Koto Tengah	Daerah yang baik untuk lokasi evakuasi bencana tsunami
4.	>40%	Koto Tengah, Kuranji, Pauh dan bagian selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung	Lokasi yang paling aman sebagai lokasi evakuasi terhadap bencana tsunami

Sumber : RTRW Kota Padang, 2010-2030

Tabel 4.8 menunjukkan untuk lokasi evakuasi bencana tsunami berada pada kemiringan lereng 15-40% pada ketinggian lebih dari 25 meter. Lokasi-lokasi ini tersebar di wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan

Koto Tangah. Sedangkan lokasi paling aman sebagai lokasi evakuasi bencana tsunami adalah wilayah dengan kelerengan lahan >40% yang tersebar di bagian timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan sebagian selatan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

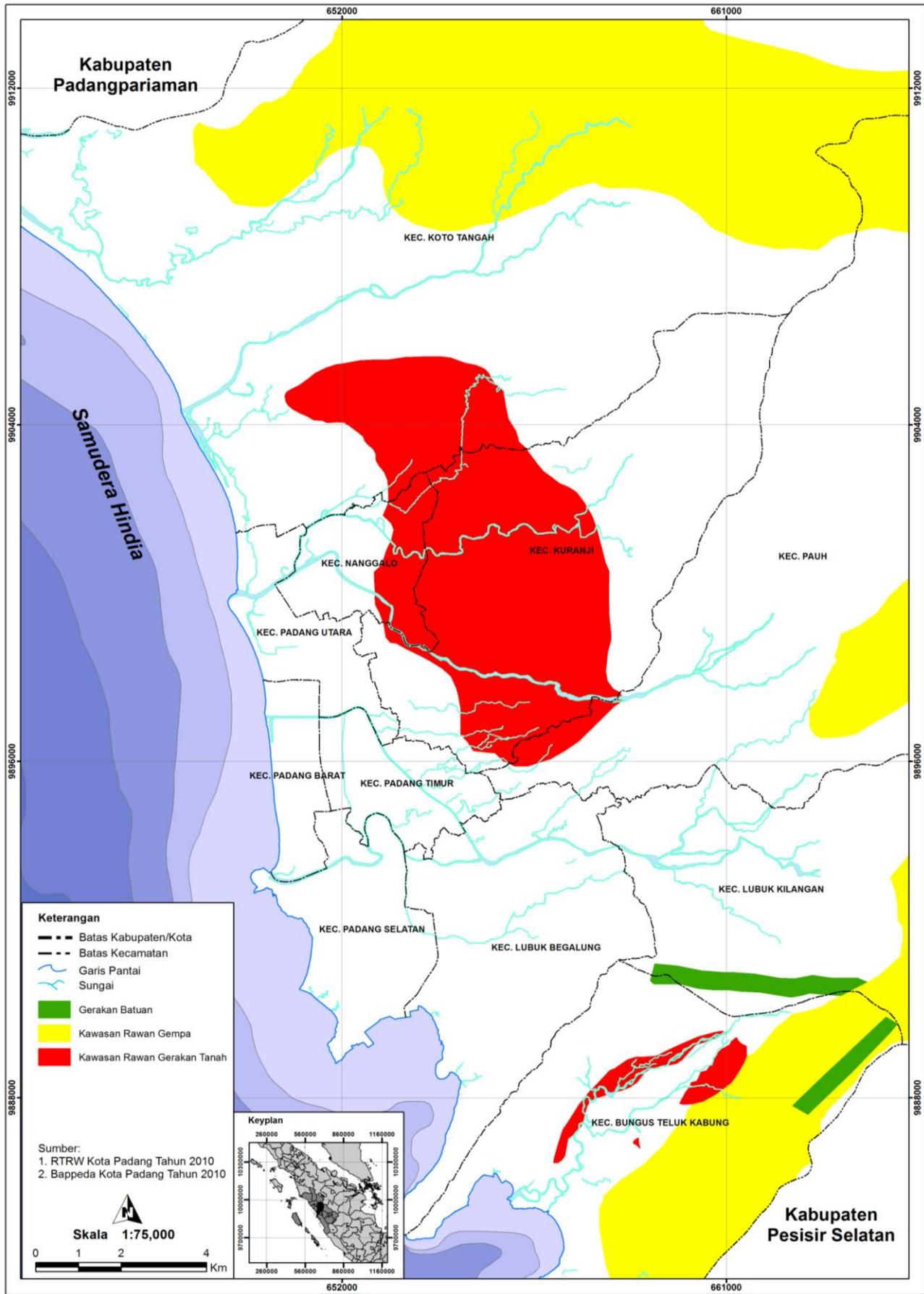
Tabel 4.9 menunjukkan persebaran kecamatan di Kota Padang yang berpotensi menimbulkan bencana tsunami berdasarkan zona. Zona 5-6 m merupakan kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman tsunami yang berada pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Padang Barat, Padang Utara dan Kecamatan Koto Tangah. Zona risiko tsunami sedang (4-5 m) berada di Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Koto Tangah. Zona dengan risiko tsunami rendah (3-4 m) berada pada Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat. Sedangkan zona aman tsunami berada di Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara dan Kecamatan Padang Timur (**Gambar 4.8**).

Tabel 4.9 Persebaran Kecamatan yang Berpotensi Tsunami Berdasarkan Zona

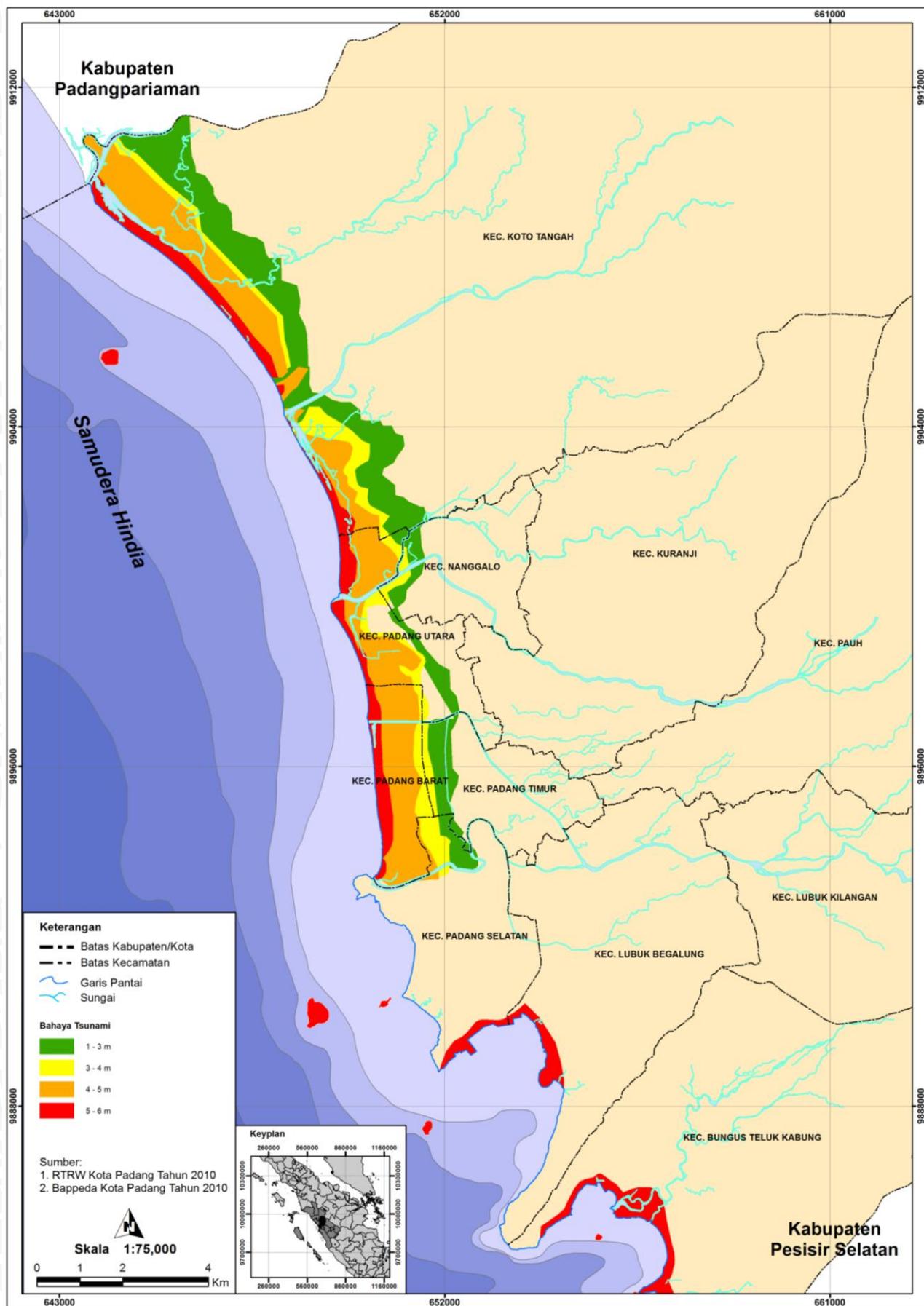
No.	Zona	Warna Zona	Wilayah	Risiko Tsunami
1.	5-6 m	Merah	Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung, Padang Barat, Padang Utara dan Koto Tangah	Tinggi
2.	4-5 m	Orange	Kecamatan Padang Barat dan Koto Tangah	Sedang
3.	3-4 m	Kuning	Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat	Rendah
4.	1-3 m	Hijau	Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara dan Padang Timur	Aman

Sumber : RTRW Kota Padang, 2010-2030

Gambar 4.8 menunjukkan Kota Padang berada pada empat zona rawan tsunami yaitu zona 5-6 m yang ditunjukkan dengan warna merah, zona 4-5 m yang ditunjukkan dengan warna orange, zona 3-4 m yang ditunjukkan dengan warna kuning dan zona 1-3 m yang ditunjukkan dengan warna hijau. **Gambar 4.8** menunjukkan peta rawan tsunami di Kota Padang.



Gambar 4.7 Peta Rawan Gempa Bumi Kota Padang Tahun 2010



Gambar 4.8 Peta Rawan Tsunami Kota Padang Tahun 2010

4.3 Karakteristik Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang

Karakteristik masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang meliputi deskripsi dari hasil kuisioner terkait lokasi keinginan pindah masyarakat dengan menggunakan 272 masyarakat. Data hasil kuisioner mencakup faktor-faktor internal (usia, pendidikan, pekerjaan, status rumah, struktur keluarga) dan faktor eksternal (pertimbangan memilih rumah saat ini).

4.3.1 Usia

Berdasarkan pembagian kelas masyarakat, maka kelompok usia yang dikelompokkan adalah 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun dan 60-69 tahun. Berikut **Tabel 4.10** menunjukkan karakteristik kelompok usia masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang.

Tabel 4.10 Karakteristik Kelompok Usia Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang

No.	Interval	Usia (%)
1.	20-29	22,4
2.	30-39	41,9
3.	40-49	19,9
4.	50-59	12,9
5.	60-69	2,9
Total		100%

Sumber : Hasil Survei, 2014

Karakteristik masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia muda yaitu 20-29 tahun dengan persentase sebesar 22,4% dan kelompok usia 30-39 tahun sebesar 41,9%. Dominasi ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda cenderung memilih lokasi tempat tinggal yang berada di kawasan pusat kota dan dekat dengan fasilitas hiburan, pekerjaan dan pelayanan sesuai kebutuhannya (Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1990). Sedangkan kelompok usia paling rendah adalah kelompok usia 50-59 tahun dengan persentase sebesar 12,9% dan kelompok usia 60-69 tahun sebesar 2,9%.

4.3.2 Pendidikan

Usaha-usaha pengurangan risiko bencana ditanggapi dengan beragam oleh masyarakat sesuai dengan tingkat pendidikan (Andreastuti, 2007). Tingkat pendidikan masyarakat yang berada di Wilayah Pantai Barat Kota Padang sebagian besar adalah masyarakat dengan pendidikan tamat SMA/SMK dengan persentase sebesar 55,1% (**Tabel 4.11**). Kondisi ini berpengaruh pada pemahaman masyarakat terhadap bencana, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin mudah untuk memahami pengetahuan bencana dan sebaliknya (Rachmawati, et.al. 2013). Salah satu contoh masih terdapat

masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang yang belum melaksanakan instruksi siaga bencana dengan baik, seperti mereka yang acuh tak acuh terhadap usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Pada kenyataannya, Pemerintah Kota Padang bersama Lembaga Swadaya Masyarakat sudah memberikan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Namun masih banyak masyarakat yang salah dalam mengartikan informasi yang disampaikan.

Tabel 4.11 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang

No.	Indikator	Pendidikan (%)
1.	Tidak sekolah/tidak tamat SD	1,5
2.	Tamat SD	10,3
3.	Tamat SMP	15,1
4.	Tamat SMA/SMK	55,1
5.	Tamat Diploma/Akademi	8,1
6.	Tamat S1	8,5
7.	Tamat S2	1,4
Total		100%

Sumber : Hasil Survei, 2014

4.3.3 Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan masyarakat yang hidup dan menetap di Wilayah Pantai Barat Kota Padang telah mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah berubahnya mata pencaharian dari agraris-pesisir (nelayan) ke pola yang non-agraris (pedagang, buruh, pegawai dan sebagainya). Proses ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan Kota Padang dari waktu ke waktu, seperti profesi nelayan. Kecenderungan pada saat ini banyak masyarakat yang meninggalkan profesi nelayan dengan beralih pada kegiatan perdagangan, buruh, pegawai dan sebagainya. Pergeseran tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (Rachmawati, et.al. 2013). Hal tersebut sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan bahwa hanya 8,8% masyarakat yang berkerja sebagai nelayan (**Tabel 4.12**).

Jenis pekerjaan pada penelitian dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori yaitu Pegawai Negeri (meliputi pegawai negeri sipil, guru dan pegawai perusahaan BUMN), nelayan, pegawai swasta (meliputi karyawan perusahaan swasta dan karyawan pabrik), pensiunan dan lain-lain (seperti ibu rumah tangga, pedagang, tidak bekerja). Persentase karakteristik masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada **Tabel 4.12**.

Tabel 4.12 Karakteristik Pekerjaan Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang

No.	Indikator	Pekerjaan (%)
1.	PNS	14,7
2.	Nelayan	8,8
3.	Swasta	38,2
4.	Pensiunan	8,1
5.	Ibu Rumah Tangga, pedagang dan tidak bekerja	30,1
Total		100%

Sumber : Hasil Survei, 2014

Meskipun berada pada wilayah pesisir pantai, jenis pekerjaan masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai pegawai swasta sebesar 38,2% (**Tabel 4.12**). Dominasi ini terjadi karena Wilayah Pantai Barat Kota Padang terletak di pusat perkotaan dan telah terjadinya peralihan mata pencaharian masyarakat yang bekerja sebagai pegawai swasta. Sedangkan persentase paling rendah adalah masyarakat yang sudah pensiun sebesar 8,1%.

4.3.4 Status Rumah

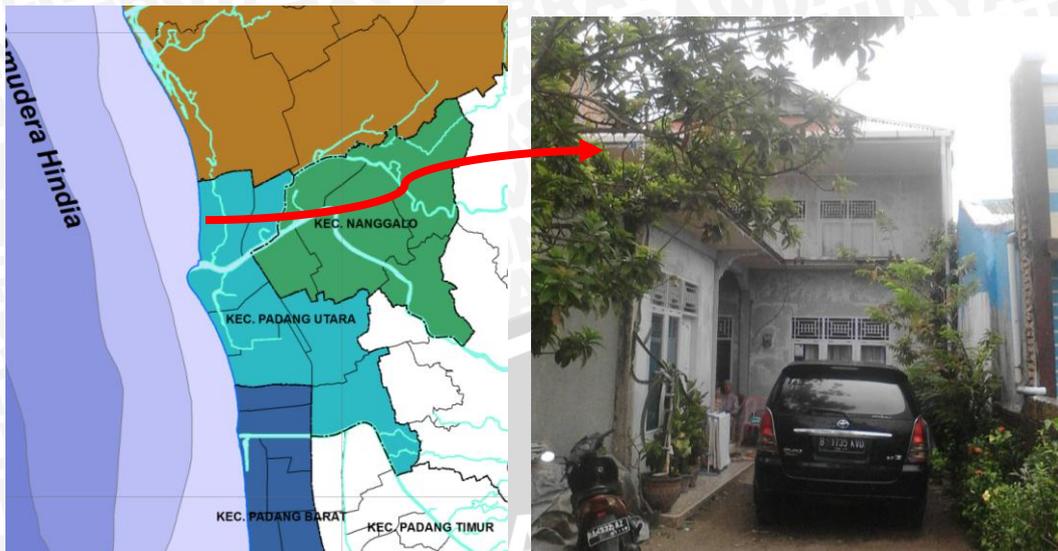
Hasil survei status rumah masyarakat, menunjukkan terdapat empat jenis status rumah yaitu milik sendiri, menyewa, warisan dan rumah dinas. Sebagian besar masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang rumahnya berstatus hak milik sebesar 54%. Sedangkan persentase paling rendah adalah masyarakat dengan status rumah dinas sebesar 0,4%. **Tabel 4.13** menunjukkan bahwa status rumah masyarakat didominasi oleh hak milik dan diikuti dengan hak sewa.

Tabel 4.13 Karakteristik Status Rumah Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang

No.	Indikator	Status Rumah (%)
1.	Milik sendiri	54,0
2.	Menyewa	29,4
3.	Rumah dinas	0,4
4.	Warisan	16,2
Total		100%

Sumber : Hasil Survei, 2014

Status kepemilikan rumah pada **Tabel 4.13** memiliki implikasi terhadap upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemilik rumah. **Gambar 4.9** menunjukkan salah satu rumah masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang yang melakukan upaya mitigasi terhadap bencana dengan meninggikan bangunan setinggi 2 sampai 3 lantai dan memperkuat fondasi bangunan. Sebanyak 29,4% masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang adalah masyarakat dengan status rumah menyewa. Masyarakat dengan status rumah menyewa tidak melakukan usaha-usaha pertahanan terhadap bencana karena tidak adanya rasa kepemilikan terhadap rumah yang ditempati saat ini.



Gambar 4.9 Peninggian Rumah Setinggi 2 Lantai di Wilayah Pantai Barat Kota Padang
Sumber : Hasil Survei, 2014

4.3.5 Struktur Keluarga

Struktur keluarga dalam penelitian diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu *single*, pasangan tanpa anak, pasangan dengan anak kecil dan pasangan dengan anak-anak sudah dewasa (Untermann, et.al., 1983). **Tabel 4.14** menunjukkan sebanyak 42,3% masyarakat didominasi oleh keluarga yang memiliki anak-anak sudah dewasa, sedangkan persentase paling rendah yaitu masyarakat yang sudah menikah namun tidak memiliki anak dengan persentase 3,7%. Sebanyak 34,2% adalah masyarakat yang sudah menikah dan memiliki anak yang masih kecil dan sebanyak 19,9% adalah masyarakat yang masih *single* atau belum menikah. Orang dewasa tanpa anak, lebih sesuai tinggal di kawasan pusat kota, dekat dengan fasilitas hiburan, pekerjaan dan pelayanan sesuai kebutuhannya (Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1990). Persentase karakteristik masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang berdasarkan struktur keluarga dapat dilihat pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4.14 Karakteristik Struktur Keluarga di Wilayah Pantai Barat Kota Padang

No.	Indikator	Struktur Keluarga (%)
1.	<i>Single</i>	19,9%
2.	Pasangan muda tanpa anak	3,7%
3.	Pasangan muda dengan anak kecil	34,2%
4.	Pasangan dengan anak-anak sudah dewasa	42,3%
Total		100%

Sumber : Hasil Survei, 2014

4.4 Perubahan Orientasi Bermukim Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang Pasca Diseminasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Pasca diseminasi bencana gempa dan tsunami yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang dan Lembaga Siaga Bencana pada tahun 2010 menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang bermukim di Wilayah Pantai Barat Kota Padang sehingga berdampak pada keinginan untuk pindah (Trisia, et.,al, 2011). Pada penelitian ini akan diteliti faktor-faktor yang memiliki keterkaitan terhadap keinginan pindah masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Pada penelitian terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi bermukim yaitu keinginan pindah, usia, pekerjaan, pendidikan, struktur keluarga, status rumah dan pertimbangan memilih lokasi. Variabel-variabel tersebut akan dianalisa dengan menggunakan analisis tabulasi silang dengan uji *chi-square* dan analisis korespondensi untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu keterkaitan diseminasi peta rawan tsunami terhadap perubahan orientasi bermukim masyarakat.

4.4.1 Pertimbangan Memilih Lokasi Sekarang

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Bulan Juni-Agustus 2014 masyarakat yang tinggal di Wilayah Pantai Barat Kota Padang memilih lokasi rumah didasarkan pada pertimbangan dekat dengan keluarga dan tempat kerja dengan persentase masing-masing sebesar 39,7% dan 36% (**Tabel 4.15**). Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Padang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal (menganut garis keturunan ibu) sehingga kedekatan dengan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam memilih lokasi rumah. **Tabel 4.15** menunjukkan karakteristik pertimbangan masyarakat dalam memilih lokasi rumah yang mereka tempati saat ini.

Tabel 4.15 Karakteristik Pertimbangan Masyarakat Memilih Rumah Saat Ini

No.	Indikator	Pertimbangan Memilih Rumah (%)
1.	Dekat keluarga	39,7%
2.	Dekat tempat kerja	36,0%
3.	Harga terjangkau	8,5%
4.	Dekat dengan kota	5,5%
5.	Kelengkapan sarana prasarana	9,9%
6.	Dekat tempat kerja dan harga sewa terjangkau	0,4%
Total		100%

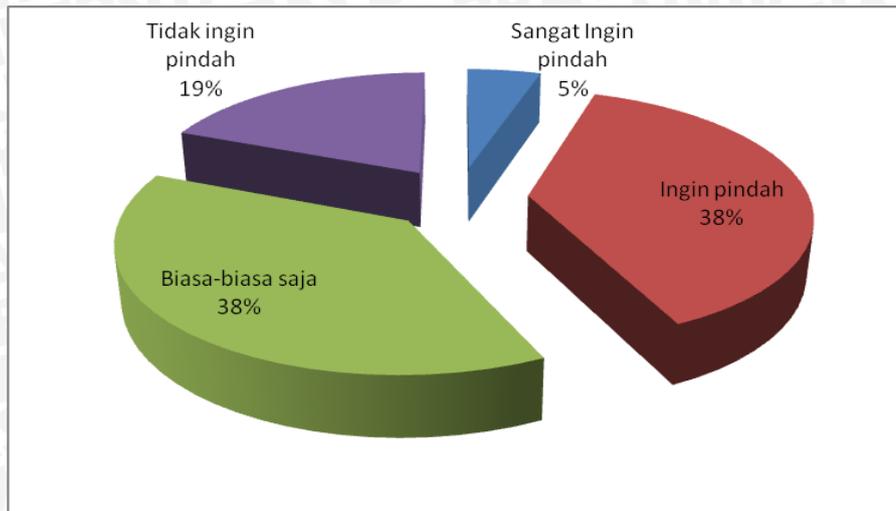
Sumber : Hasil Survei, 2014

Pada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, kedekatan dengan tempat kerja mempunyai kecenderungan memilih lokasi tempat tinggal dekat dengan tempat kerja. Tujuannya adalah untuk memperkecil biaya transportasi. Hal ini juga tampak pada wilayah penelitian dimana alasan kedua pertimbangan masyarakat dalam memilih lokasi

rumah adalah dekat dengan tempat kerja. Wilayah pesisir biasanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Secara geografis, kawasan pesisir barat Kota Padang memberikan peluang bekerja di sektor agraris (perikanan) yang pada umumnya nelayan dan petani tambak tinggal di daerah pesisir (Rachmawati, et.al. 2013). Selain itu, Kota Padang adalah kawasan cepat tumbuh yang sangat dinamis sehingga pertumbuhan kawasan perdagangan dan jasa sangat cepat menumbuhkan peluang kerja. Para pendatang umumnya pindah ke kawasan pesisir agar dekat dengan tempat kerja. Dengan ditetapkannya Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadikan kawasan ini dilengkapi oleh sarana dan prasarana pendukung kegiatan berskala nasional dan internasional.

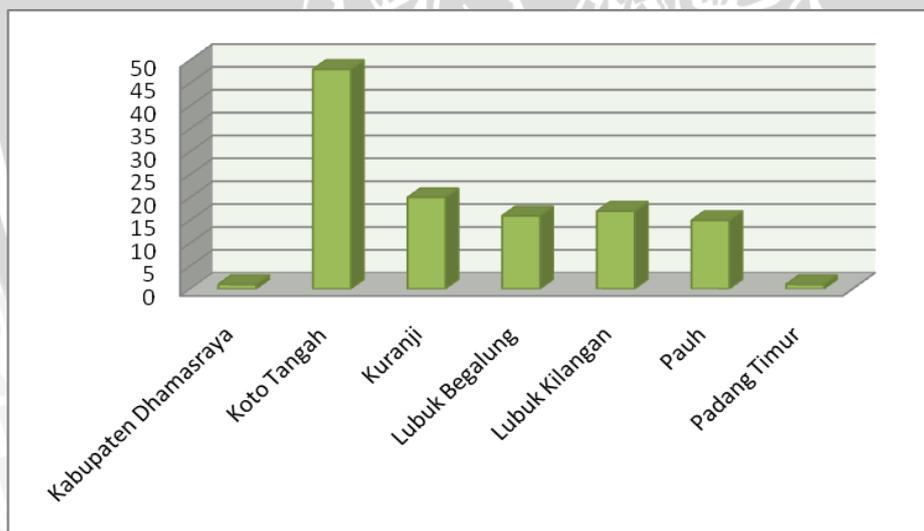
4.4.2 Keinginan Pindah

Peta zona bahaya tsunami yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang tahun 2010, menyebabkan masyarakat yang bermukim pada zona merah menjadi takut dan berkeinginan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami (Niken, *et. al.*, 2010). Hal ini dikarenakan peta rawan bencana gempa dan tsunami tersebut belum disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Berdasarkan hasil survei sebanyak 43,4% masyarakat berkeinginan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Keinginan pindah disebabkan oleh distorsi informasi yang diterima oleh masyarakat terkait dengan peta rawan tsunami. Namun terdapat sebanyak 19,1% masyarakat yang tidak ingin pindah karena menganggap bencana merupakan bagaian dari sebuah takdir yang harus diterima. Selain itu juga mengingat harga lahan di lokasi yang jauh dari pinggir pantai cenderung lebih mahal pasca gempa. Pada umumnya masyarakat yang tidak ingin pindah adalah penduduk asli atau yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun di Wilayah Pantai Barat Kota Padang (Rachmawati, et.al. 2013). **Gambar 4.10** menunjukkan tingkat keinginan pindah masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang.



Gambar 4.10 Tingkat Keinginan Pindah Masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang
Sumber : Hasil Survei, 2014

Gambar 4.10 menunjukkan hasil penjumlahan masyarakat yang sangat ingin dan ingin pindah dengan total sebesar 43,4% masyarakat berkeinginan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Adapun lokasi yang dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan alternatif pindah adalah Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Padang Timur dan Kecamatan Pauh (**Gambar 4.11**).



Gambar 4.11 Persebaran Lokasi Pindah
Sumber : Hasil Survei, 2014

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa Kecamatan Koto Tengah merupakan lokasi terbanyak yang dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif untuk pindah. Hal ini dikarenakan Kecamatan Koto Tengah terletak jauh dari pantai dan aman dari bencana tsunami (**Gambar 4.14**). **Tabel 4.16** menunjukkan sebanyak 17,62% masyarakat lebih dominan untuk pindah ke Kecamatan Koto Tengah. Dengan rincian sebanyak 6,98%

masyarakat yang berasal dari Kecamatan Padang Barat, 2,57% masyarakat dari Kecamatan Padang Utara, 0,36% masyarakat dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung, 0,73% masyarakat dari Kecamatan Padang Selatan dan 2,57% masyarakat dari Kecamatan Lubuk Begalung yang menginginkan untuk pindah ke Kecamatan Koto Tangah. Selain itu terdapat 4,41% masyarakat yang berada di sepanjang pantai Kecamatan Koto Tangah berkeinginan untuk pindah ke kecamatan yang sama dengan lokasi jauh dari bibir pantai. Lokasi lainnya yang dipilih oleh masyarakat untuk pindah adalah Kecamatan Kuranji sebanyak 7,33% masyarakat, Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 5,84% masyarakat, Kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak 6,24% masyarakat dan Kecamatan Pauh sebanyak 5,49% masyarakat (**Tabel 4.16**).

Tabel 4.16 Jumlah Lokasi Pindah Masyarakat Berdasarkan Asal Tinggal

No.	Asal Masyarakat (Kecamatan)	Lokasi Pindah (Kecamatan)					Total (%)
		Koto Tangah (%)	Kuranji (%)	Lubuk Begalung (%)	Lubuk Kilangan (%)	Pauh (%)	
1.	Padang Utara	2,57	2,57	0,36	0	1,1	6,6
2.	Padang Barat	6,98	0	1,1	1,47	1,83	11,38
3.	Bungus Teluk Kabung	0,36	0,73	1,83	2,2	0	5,12
4.	Padang Selatan	0,73	0,73	0,36	0	0	1,39
5.	Lubuk Begalung	2,57	0	0,36	0	1,83	4,76
6.	Nanggalo	0	0	1,47	1,47	0	2,94
7.	Koto Tangah	4,41	3,3	0,36	1,1	0,73	9,9
Total		17,62	7,33	5,84	6,24	5,49	42,52

Sumber : Hasil Survei, 2014

Gambar 4.12 merupakan peta pola ruang Kota Padang Tahun 2014. Pola ruang Kota Padang menunjukkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, sarana dan prasarana tersebar di sepanjang Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena lokasi yang terletak di daerah yang rawan tsunami sehingga dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar apabila terjadi tsunami di masa yang akan datang. Hasil survei arah keinginan pindah masyarakat berdasarkan pola ruang Kota Padang dapat dilihat pada **Gambar 4.13**.

Gambar 4.13 menunjukkan persebaran lokasi yang diinginkan masyarakat untuk pindah cenderung mengarah ke utara Kota Padang yaitu Kecamatan Koto Tangah. Hal ini sesuai dengan ditetapkannya Kecamatan Koto Tangah sebagai pusat pelayanan baru sehingga memberikan pengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk pindah. Selain itu Kecamatan Koto Tangah nantinya akan dikembangkan beberapa infrastruktur publik yang bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat (RTRW Kota Padang, 2010-2030). Apabila dilihat

dari guna lahannya, Kecamatan Koto Tengah relatif masih terdapat lahan kosong untuk pengembangan permukiman, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang menginginkan pindah ke Kawasan Aia Pacah.

Selain Kecamatan Koto Tengah, masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang juga menginginkan untuk pindah ke Kecamatan Kuranji. Apabila dilihat dari penggunaan lahan permukiman di Kecamatan Kuranji, lahan yang baru dimanfaatkan untuk permukiman adalah sebanyak 10,05% dari total 17,24% (Irawati, et.,al, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan penduduk ke Kecamatan Kuranji masih sesuai dengan pola ruang Kota Padang. Lokasi lainnya yang dijadikan alternatif pindah oleh masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang adalah Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Apabila dilihat dari guna lahan Kota Padang, perubahan orientasi bermukim masyarakat menuju ke Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Lubuk Kilangan masih sesuai dengan pola ruang Kota Padang. Hal ini dikarenakan kondisi topografi yang tinggi di kawasan timur kota masih tersedia cukup banyak lahan kosong yaitu sekitar 45% dari luas kota (Trisia, et.,al, 2011).

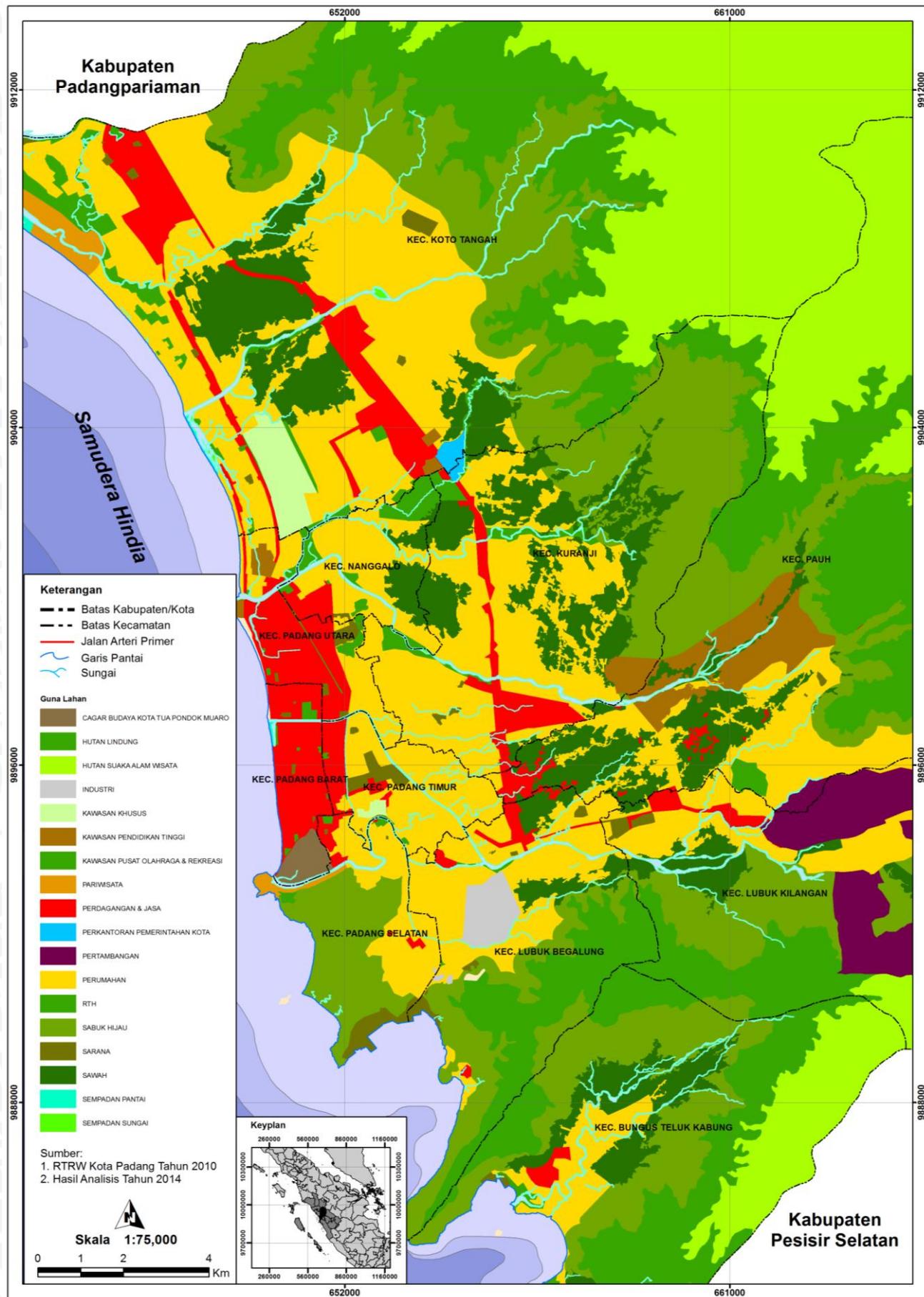
4.4.3 Orientasi Bermukim terhadap Peta Potensi Bencana Kota Padang

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa perubahan orientasi bermukim masyarakat mengarah ke kawasan potensi bencana lainnya yaitu bencana gempa bumi, banjir dan bencana longsor. Sebanyak 7,33% masyarakat dengan lokasi keinginan pindah berada di lokasi risiko bencana gempa bumi. Salah satu contoh, masyarakat yang berasal dari Kecamatan Padang Utara yang ingin pindah ke Kecamatan Kuranji. Kondisi tersebut tentu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat karena mereka masih berada di kawasan yang rawan bencana. Selain itu terdapat sebanyak 12,08% masyarakat yang memilih Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai alternatif untuk pindah (**Tabel 4.17**). Padahal berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Padang Timur termasuk salah satu kecamatan yang berada pada kawasan rawan banjir dan longsor (**Gambar 4.14**).

Tabel 4.17 Lokasi Pindah Berdasarkan Potensi Bencana

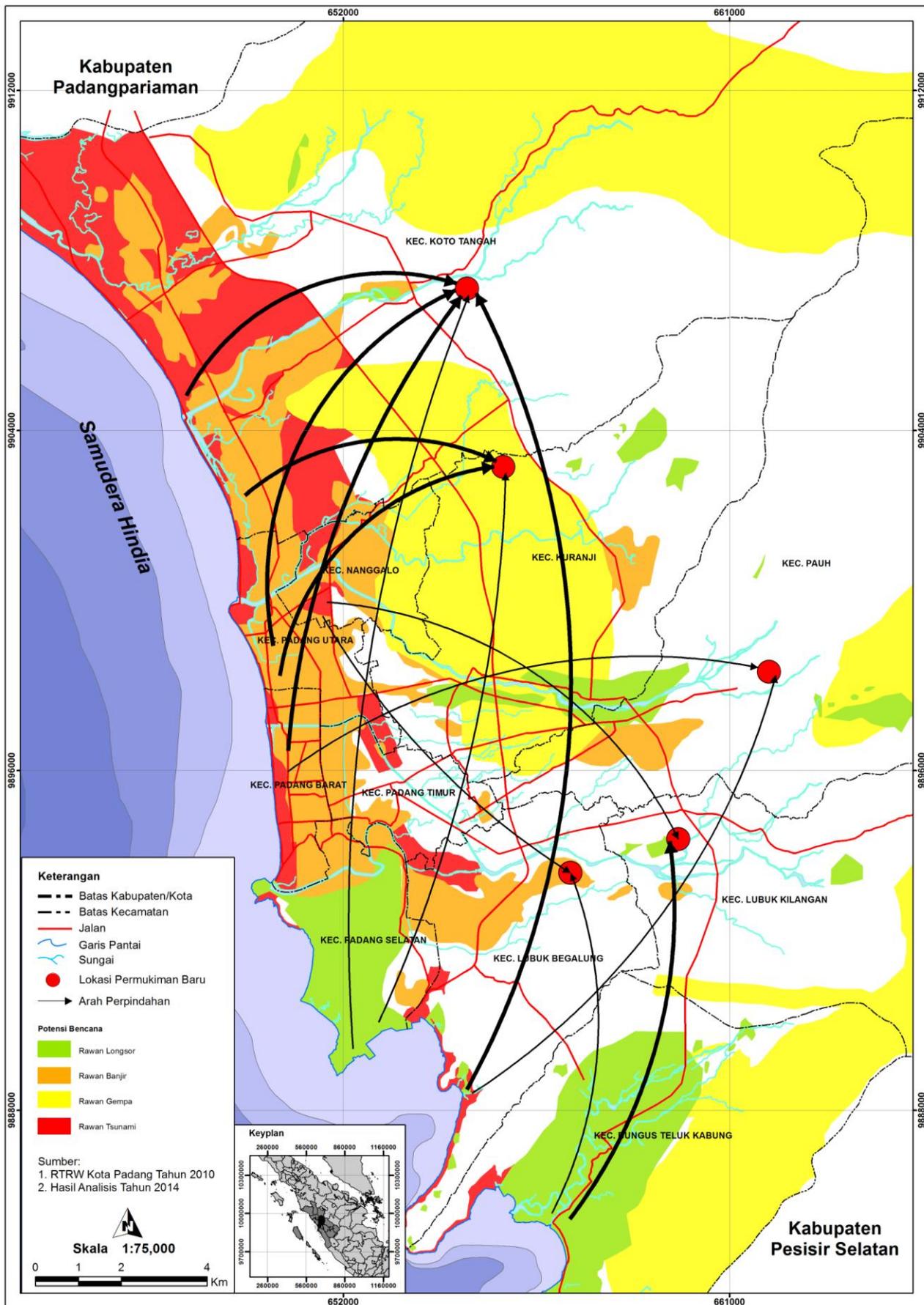
No.	Asal Masyarakat (Kecamatan)	Lokasi Pindah (Kecamatan)				
		Koto Tengah	Kuranji	Lubuk Begalung	Lubuk Kilangan	Pauh
1.	Padang Utara	Aman	Gempa	Banjir	-	Aman
2.	Padang Barat	Aman	-	Banjir	Longsor	Aman
3.	Bungus Teluk Kabung	Aman	Gempa	Banjir	Longsor	-
4.	Padang Selatan	Aman	Gempa	Banjir	-	-
5.	Lubuk Begalung	Aman	-	Banjir	-	Aman
6.	Nanggalo	-	-	Banjir	Longsor	Aman
7.	Koto Tengah	Aman	Gempa	Banjir	Longsor	Aman

Sumber : Hasil Analisis, 2014



Gambar 4.12 Peta Pola Ruang Kota Padang Tahun 2014





Gambar 4.14 Peta Keinginan Pindah Masyarakat dan Potensi Bencana

4.4.4 Analisis Tabulasi Silang dan Uji *Chi-square*

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan di Wilayah Pantai Barat Kota Padang sebanyak 43,4% masyarakat berkeinginan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Analisis tabulasi silang dan uji *chi-square* digunakan untuk melihat keterkaitan atau keterhubungan antar variabel atau faktor. Pada analisis tabulasi silang dan uji *chi-square*, data yang digunakan sebagai input adalah hasil kuisioner masyarakat yang mencakup hubungan antar faktor internal (usia, pendidikan, jenis pekerjaan, status rumah, struktur keluarga) dan faktor eksternal (pertimbangan memilih lokasi) terhadap keinginan pindah. Adapun data yang akan diuji dalam penelitian adalah hubungan usia dengan keinginan pindah, hubungan tingkat pendidikan dengan keinginan pindah, hubungan jenis pekerjaan dengan keinginan pindah, hubungan status rumah dengan keinginan pindah, hubungan struktur keluarga dengan keinginan pindah, dan hubungan pertimbangan memilih lokasi rumah dengan keinginan pindah. **Tabel 4.18** menunjukkan hasil analisis *crosstab* terhadap keinginan pindah.

Tabel 4.18 Analisis *Crosstab* terhadap Keinginan Pindah

	Keinginan Pindah				Total
	Tidak Ingin	Biasa saja	Ingin	Sangat Ingin	
USIA					
20-29	4 1,5%	32 11,8%	22 8,1%	3 1,1%	61 22,4%
30-39	14 5,1%	43 15,8%	51 18,8%	6 2,2%	114 13,6%
40-49	14 5,1%	18 6,6%	17 6,2%	5 1,8%	54 19,9%
50-59	16 5,9%	7 2,6%	11 4,0%	1 0,4%	35 12,9%
60-69	4 1,5%	2 0,7%	2 0,7%	0 0%	8 2,9%
Total	52 19,1%	102 37,5%	103 37,9%	15 5,5%	272 100%
PENDIDIKAN					
Tidak sekolah/ tidak tamat SD	2 0,7%	1 0,4%	1 0,4%	0 0,0%	4 1,5%
SD	12 4,4%	5 1,8%	10 3,7%	1 0,4%	28 10,3%
SMP	11 4,0%	18 6,6%	8 2,9%	4 1,5%	41 15,1%
SMA	20 7,4%	61 22,4%	63 23,2%	6 2,2%	150 55,1%
Diploma/Akademi	2 0,7%	9 3,3%	8 2,9%	3 1,1%	22 8,1%
S1	4 1,5%	8 2,9%	10 3,7%	1 0,4%	23 8,5%
S2	1 0,4%	0 0,0%	3 1,1%	0 0,0%	4 1,5%
Total	52 19,1%	102 37,5%	103 37,9%	15 5,5%	272 100%

	Keinginan Pindah				Total
	Tidak Ingin	Biasa saja	Ingin	Sangat Ingin	
PEKERJAAN					
PNS	7 2,6%	16 5,9%	13 4,8%	4 1,5%	40 14,7%
Nelayan	13 4,8%	7 2,6%	2 0,7%	2 0,7%	24 8,8%
Swasta	7 2,6%	42 15,4%	50 18,4%	5 1,8%	104 38,2%
Pensiunan	8 2,6%	8 2,9%	6 2,2%	0 0,4%	22 8,1%
Lain-lain	17 8,1%	29 9,9%	32 10,3%	4 2,2%	82 30,1%
Total	52 19,1%	102 37,5%	103 37,9%	15 5,5%	272 100%
STATUS RUMAH					
Milik sendiri	31 11,4%	60 22,1%	45 16,5%	11 4,0%	147 54,0%
Menyewa	7 2,6%	27 9,9%	44 16,2%	2 0,7%	80 29,4%
Rumah dinas	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,4%
Warisan	13 4,8%	15 5,5%	14 5,1%	2 0,7%	44 16,2%
Total	52 19,1%	102 37,5%	103 37,9%	15 5,5%	272 100%
STRUKTUR KELUARGA					
Single	3 1,1%	31 11,4%	16 5,9%	4 1,5%	54 19,9%
Pasangan tanpa anak	2 0,7%	5 1,8%	3 1,1%	0 0,0%	10 3,7%
Pasangan dengan anak kecil	11 4,0%	28 10,3%	50 18,4%	4 1,5%	93 34,2%
Pasangan dengan anak dewasa	36 13,2%	38 14,0%	34 12,5%	7 2,6%	115 42,3%
Total	52 19,1%	102 37,5%	103 37,9%	15 5,5%	272 100%
PERTIMBANGAN MEMILIH RUMAH SAAT INI					
Dekat keluarga	28 10,3%	45 16,5%	31 11,4%	4 1,5%	108 39,7%
Dekat tempat kerja	14 5,1%	26 9,6%	53 19,5%	5 1,8%	98 36,0%
Harga terjangkau	2 0,7%	10 3,7%	6 2,2%	5 1,8%	23 8,5%
Dekat dengan kota	5 1,8%	7 2,6%	2 0,7%	1 0,4%	15 5,5%
Kelengkapan sarana prasarana	4 1,5%	10 3,7%	13 4,8%	0 0,0%	27 9,9%
Dekat dengan tempat kerja dan harga sewa terjangkau	0 0,0%	1 0,4%	0 0,0%	0 0,0%	1 0,4%
Total	52 19,1%	102 37,5%	103 37,9%	15 5,5%	272 100%

Sumber : Hasil Survei, 2014

Untuk menentukan hubungan atau tidaknya antar faktor internal dan eksternal terhadap keinginan pindah maka dilakukan uji *chi-square*. Kriteria pengujian yang digunakan pada penelitian adalah apabila nilai *chi-square* $\leq \alpha$ (0,05) maka terdapat

hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada **Tabel 4.19** menunjukkan analisis hubungan keterkaitan antar variabel yang diduga mempunyai hubungan antara variabel melalui uji *chi-square*.

Tabel 4.19 Uji *Chi-square* antar 2 Variabel

Variabel 1	Variabel 2	Chisquare	Keterangan
Usia	Keinginan pindah	0,010	Terdapat hubungan
Pendidikan	Keinginan pindah	0,020	Terdapat hubungan
Pekerjaan	Keinginan pindah	0,000	Terdapat hubungan
Status rumah	Keinginan pindah	0,005	Terdapat hubungan
Struktur keluarga	Keinginan pindah	0,000	Terdapat hubungan
Pertimbangan memilih rumah saat ini	Keinginan pindah	0,001	Terdapat hubungan

Sumber : Hasil Analisis, 2014

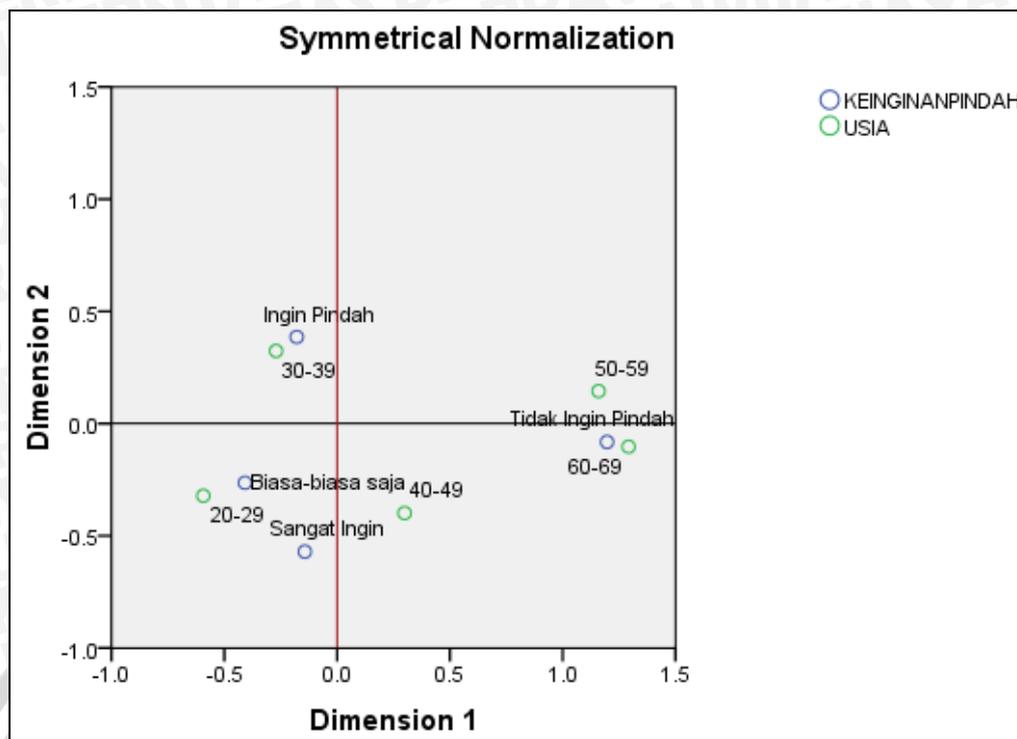
Berdasarkan hasil perhitungan uji *chi-square* pada **Tabel 4.19** menunjukkan nilai *chi-square* pada masing-masing variabel $\leq \alpha$ (0,05) yang berarti memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap variabel keinginan pindah. Adapun variabel yang memiliki hubungan dan keterkaitan adalah variabel usia, pendidikan, pekerjaan, status rumah, struktur keluarga dan variabel pertimbangan memilih lokasi. Hal ini dikarenakan seperti variabel usia, kelompok anak usia balita <5 tahun merupakan kelompok usia penduduk yang rentan terhadap bahaya tsunami. Kelompok usia ini dianggap memiliki kemampuan yang rendah untuk menyelamatkan diri dari bahaya tsunami (Varley dalam Firmansyah, 1998). Oleh karena itu variabel usia memiliki hubungan terhadap keinginan pindah suatu masyarakat.

4.4.3 Analisis Korespondensi

Analisis korespondensi digunakan untuk memetakan hubungan dan keterkaitan antara dua variabel dalam bentuk grafik dan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu keterkaitan diseminasi peta rawan tsunami terhadap perubahan orientasi bermukim masyarakat. Analisis korespondensi akan melihat sejauh mana kedekatan variabel saling berhubungan dengan variabel keinginan pindah yang dijabarkan dalam bentuk grafik.

A. Korespondensi antara Usia terhadap Keinginan Pindah

Korespondensi usia terhadap keinginan pindah dilakukan guna mengetahui kecenderungan kelompok usia masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang yang ingin pindah atau tidak ke daerah yang dianggap aman dari bencana tsunami. Berdasarkan hasil perhitungan uji *chi-square* pada **Tabel 4.19**, kelompok usia memiliki hubungan terhadap prioritas bermukim masyarakat dari isu tsunami. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas berdasarkan kelompok usia yaitu sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat hubungan atau keterkaitan usia masyarakat terhadap keinginan pindah.



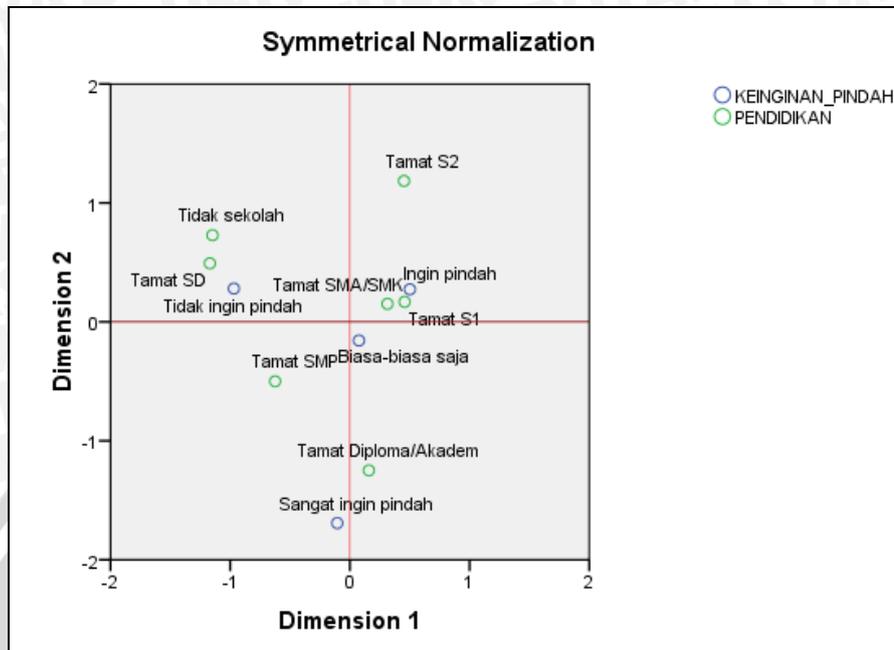
Gambar 4.15 Korespondensi Tingkat Usia terhadap Keinginan Pindah
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Gambar 4.15 merupakan biplot untuk melihat secara visual dominasi profil kolom terhadap profil baris atau sebaliknya dengan mengamati titik terdekat. Melalui plot tersebut menunjukkan sebanyak 11,8% masyarakat (**Tabel 4.18**) yang berusia 20-29 tahun lebih cenderung menganggap keinginan pindah adalah hal yang tidak mendesak (biasa saja). Kelompok usia muda, lebih sesuai tinggal di kawasan pusat kota, dekat dengan fasilitas hiburan, pekerjaan dan pelayanan sesuai kebutuhannya (Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1990). Lain halnya sebanyak 18,8% masyarakat dengan tingkatan usia 30-39 tahun lebih memilih untuk pindah ke lokasi yang dianggap aman tsunami, karena mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik yang jauh dari ancaman bencana tsunami. Sedangkan kelompok usia tua yaitu usia 50-59 tahun sebanyak 5,9% masyarakat dan kelompok usia 60-69 tahun sebanyak 1,5% masyarakat lebih cenderung tidak ingin pindah. Kelompok usia tua yang sudah tidak bekerja lebih cenderung berada di tempat tinggal asal atau tinggal bersama anak (Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1990:19-20).

B. Korespondensi antara Tingkat Pendidikan terhadap Keinginan Pindah

Tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan atau keterkaitan dengan keinginan pindah. Hal ini terbukti dari hasil uji *chi-square* dengan nilai sebesar 0.020 pada **Tabel 4.19**. Dari hasil pengujian *chi-square* tersebut, maka peneliti melakukan analisis

korespondensi untuk melihat sejauh mana kedekatan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan keinginan pindah melalui biplot (**Gambar 4.16**).



Gambar 4.16 Korespondensi Tingkat Pendidikan terhadap Keinginan Pindah
Sumber : Hasil Analisis, 2014

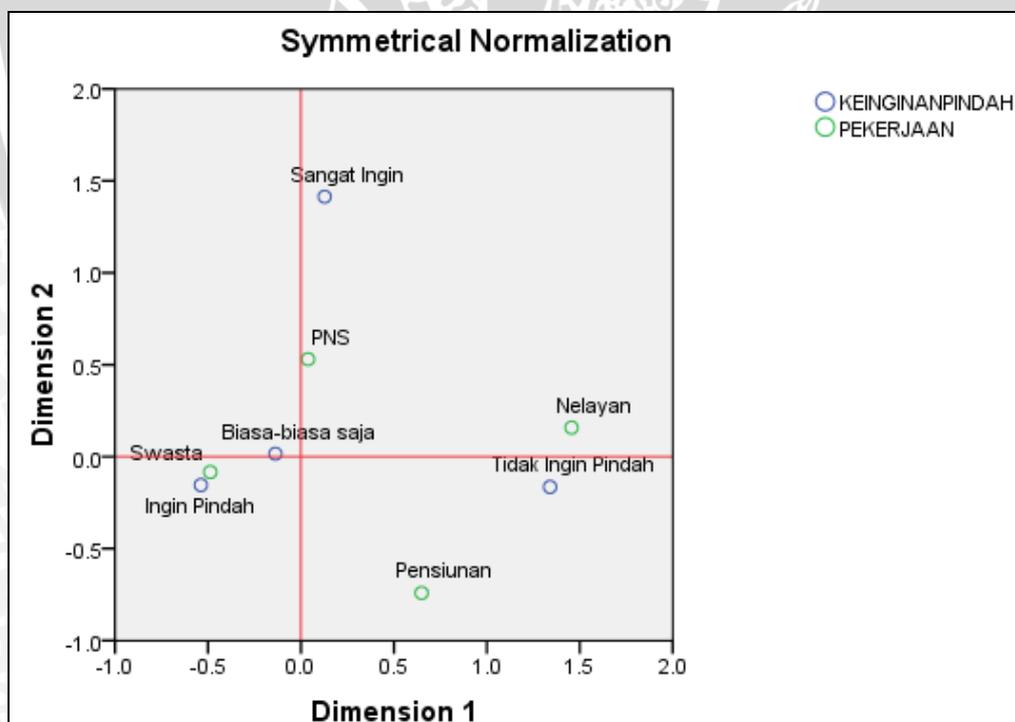
Berdasarkan tampilan plot hasil korespondensi pada **Gambar 4.16** menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SMA/SMK dan sarjana lebih cenderung untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Sebanyak 23,2% (**Tabel 4.18**) masyarakat dengan pendidikan tamat SMA/SMK dan 3,7% masyarakat dengan pendidikan tamat S1 menginginkan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga pemahaman terhadap kebencanaan (Rachmawati, et.al. 2013). Masyarakat dengan pendidikan tamat SD dan tidak sekolah lebih cenderung untuk tidak pindah sebanyak 0,7% dan 4,4% (**Tabel 4.18**). Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang sangat rendah mempengaruhi dalam mencerna informasi kebencanaan dan menjadi acuh terhadap informasi yang disampaikan pemerintah. Sama halnya sebanyak 6,6% masyarakat dengan pendidikan tamat SMP lebih menganggap pindah adalah hal yang biasa saja, karena mereka tidak terlalu mengkhawatirkan akan dampak potensi bencana tersebut.

C. Korespondensi antara Jenis Pekerjaan terhadap Keinginan Pindah

Berdasarkan hasil perhitungan uji *chi-square* pada **Tabel 4.19**, jenis pekerjaan memiliki hubungan atau keterkaitan prioritas bermukim masyarakat dari adanya isu tsunami. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas berdasarkan pekerjaan sebesar 0,000

yang lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat hubungan jenis pekerjaan terhadap keinginan pindah.

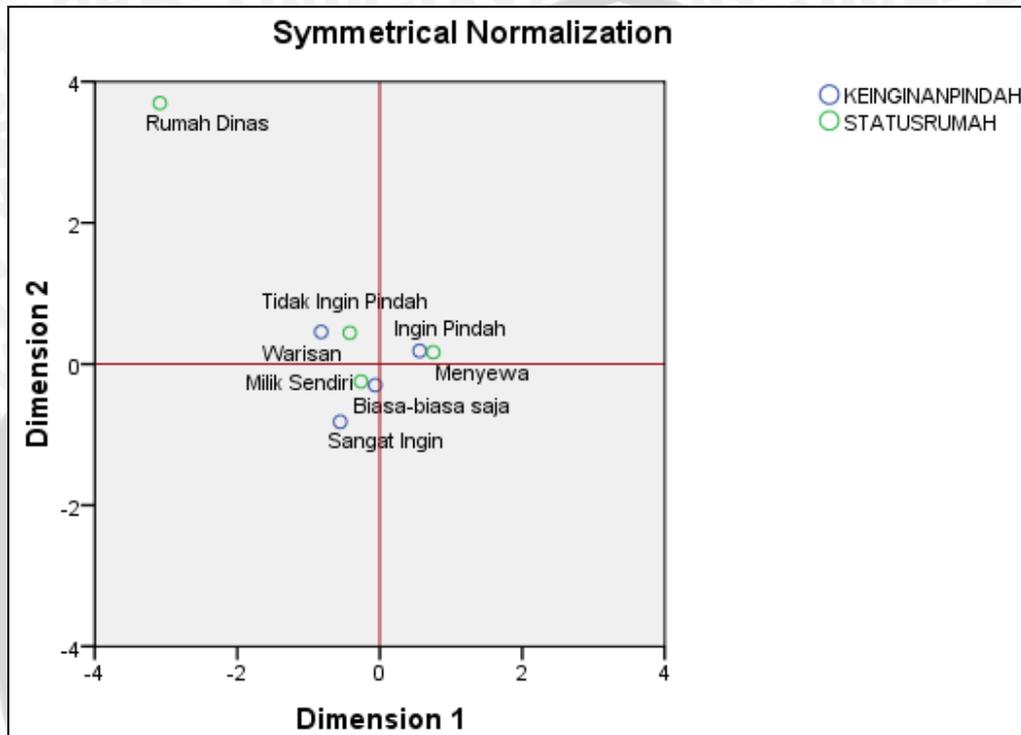
Gambar 4.17 menunjukkan sebanyak 4,8% masyarakat (**Tabel 4.18**) yang berada di Wilayah Pantai Barat Kota Padang dengan mata pencaharian sebagai nelayan lebih memilih untuk tetap berada di lokasi saat ini. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan cenderung memilih lokasi yang berada dekat dengan tempat kerja (Bayu, 2012). Berbeda halnya dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai swasta lebih cenderung untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami sebanyak 18,4% masyarakat. Sebanyak 5,9% masyarakat (**Tabel 4.18**) dengan profesi sebagai PNS lebih menganggap keinginan pindah adalah hal yang tidak mendesak (biasa), dengan alasan lokasi pekerjaan mereka yang terletak di pusat kota. Masyarakat yang bekerja di kantoran lebih cenderung memilih lokasi permukiman yang dekat dengan pusat kota dengan alasan untuk meminimalkan ongkos transportasi (Bayu, 2012). Sama halnya sebanyak 2,9% masyarakat yang telah pensiun menganggap keinginan pindah adalah hal yang tidak mendesak (biasa-biasa saja). Hal ini dikarenakan lokasi rumah mereka saat ini dekat dengan keluarga. Kebanyakan dari masyarakat juga cenderung memilih permukiman yang dekat dengan komunitas atau keluarga (Bayu, 2012).



Gambar 4.17 Korespondensi Jenis Pekerjaan terhadap Keinginan Pindah
Sumber : Hasil Analisis, 2014

D. Korespondensi antara Status Rumah terhadap Keinginan Pindah

Status rumah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan prioritas bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas berdasarkan status rumah sebesar 0,005 (**Tabel 4.19**) yang lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat hubungan atau keterkaitan.



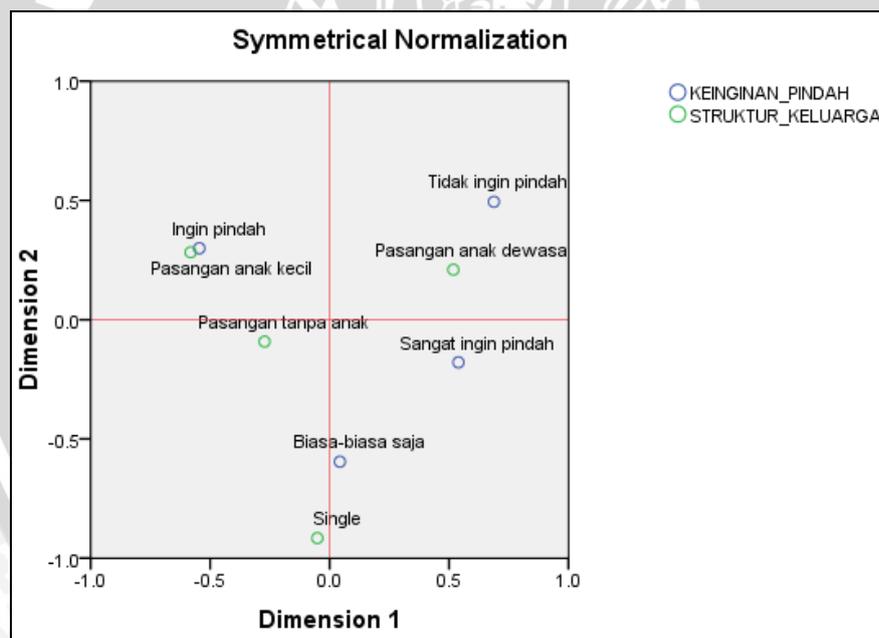
Gambar 4.18 Korespondensi Status Rumah terhadap Keinginan Pindah
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Hasil plot korespondensi pada **Gambar 4.18** dan perhitungan tabulasi silang pada **Tabel 4.18** menunjukkan sebanyak 16,2% masyarakat dengan status rumah menyewa menginginkan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Hal ini dikarenakan mereka menginginkan perubahan hidup yang lebih sejahtera dengan memilih lokasi yang aman dari bencana tsunami. Mengingat rumah yang mereka tempati adalah kontrakan, sehingga tidak ada rasa memiliki (Rachmawati, et.al. 2013). Berbeda dengan 22,1% masyarakat (**Tabel 4.18**) dengan status rumah milik pribadi lebih menganggap hal yang biasa saja terkait keinginan untuk pindah. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka sudah merasa nyaman berada di lokasi saat ini dan menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha dalam mencari nafkah. Masyarakat dengan status rumah milik sendiri, pertahanan terhadap bencana akan lebih terlihat seperti mereka tidak ragu-ragu memperkuat rumah guna bertahan dari bencana gempa dan tsunami dengan meninggikan rumahnya (**Gambar 4.18**). Namun juga tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka untuk pindah,

apabila suatu saat Pemerintah Kota Padang memberikan anggaran dana bagi mereka untuk pindah ke lokasi yang aman dari bencana tsunami. Sama halnya sebanyak 4,8% masyarakat dengan status rumah milik orangtua atau warisan lebih memilih untuk tetap berada di lokasi saat ini, karena mereka menganggap rumah tersebut adalah peninggalan orangtua.

E. Korespondensi antara Struktur Keluarga terhadap Keinginan Pindah

Struktur keluarga juga memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap prioritas bermukim masyarakat, seperti hasil uji *chi-square* pada **Tabel 4.19** yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel struktur keluarga sebesar 0,000. **Gambar 4.19** dan **Tabel 4.18** menunjukkan sebanyak 13,2% masyarakat yang memiliki anak-anak sudah dewasa lebih cenderung untuk tidak pindah. Kelompok keluarga yang sudah membesarkan anak atau memiliki anak-anak yang sudah dewasa dan tidak bekerja lebih cenderung tinggal bersama anak atau tetap berada di daerah asal (Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya).



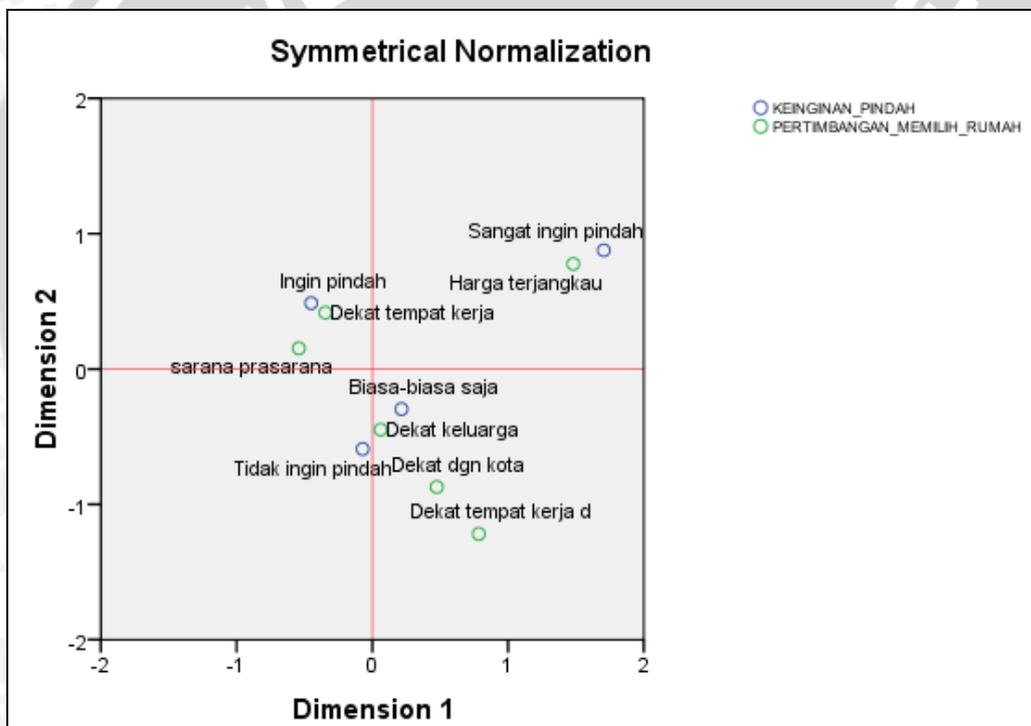
Gambar 4.19 Korespondensi Struktur Keluarga terhadap Keinginan Pindah
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Berbeda halnya dengan masyarakat yang masih memiliki anak-anak kecil sebanyak 18,4% (**Tabel 4.18**) masyarakat lebih menginginkan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Hal ini dikarenakan bahwa mereka menginginkan perubahan hidup yang lebih sejahtera dengan memilih lokasi yang aman dan jauh dari bibir pantai (Rachmawati, et.al. 2013). Lain halnya sebanyak 11,4% masyarakat (**Tabel 4.18**) yang belum menikah lebih menganggap pindah adalah hal yang biasa. Hal ini dikarenakan

faktor status masyarakat yang masih *single* dan lokasi kerja yang berada di pusat kota. Masyarakat yang tidak memiliki anak cenderung memilih lokasi berada di kawasan pusat kota yang dekat dengan fasilitas hiburan, pekerjaan, dan pelayanan sesuai kebutuhannya (Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1990).

F. Korespondensi antara Pertimbangan Memilih Lokasi Saat Ini terhadap Keinginan Pindah

Pertimbangan dalam memilih lokasi rumah memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap prioritas bermukim masyarakat, seperti hasil analisis *chi-square* pada **Tabel 4.19** yang menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pertimbangan lokasi sebesar 0,001. Keterkaitan antara masyarakat yang memilih lokasi rumah saat ini dengan alasan dekat dengan keluarga terhadap keinginan pindah memiliki hubungan pada **Gambar 4.20**.



Gambar 4.20 Korespondensi Pertimbangan Lokasi terhadap Keinginan Pindah
Sumber : Hasil Analisis, 2014

Sebanyak 16,5% masyarakat (**Tabel 4.18**) yang memilih lokasi rumah saat ini dengan alasan pertimbangan dekat keluarga, menganggap keinginan pindah adalah suatu hal yang tidak mendesak (biasa-biasa saja). Hal ini dikarenakan sebagian mereka beranggapan sulit untuk menyesuaikan kehidupan sosial di lokasi pindah yang baru (Bayu, 2012). Sama halnya sebanyak 2,6% dan 3,7% (**Tabel 4.18**) masyarakat yang memilih lokasi saat ini dengan pertimbangan dekat dengan kota dan harga terjangkau juga beranggapan bahwa pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami bukan suatu hal yang

mendesak (biasa saja). Masyarakat ini cenderung untuk memilih lokasi yang kegiatan pelayanannya berada di pusat kota, agar dapat meminimalkan ongkos transportasi (Bayu, 2012). Sebanyak 19,5% masyarakat (**Tabel 4.18**) yang memilih rumah saat ini dengan alasan dekat dengan tempat kerja lebih cenderung untuk ingin pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami. Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat yang memilih dengan alasan kelengkapan sarana dan prasarana, juga memiliki keinginan untuk pindah ke daerah yang dianggap aman tsunami sebesar 4,8% karena mereka yang sudah tidak nyaman lagi tinggal di daerah bencana akibat pengaruh peta rawan tsunami. Sebagian besar penduduk yang ingin pindah adalah penduduk yang mempunyai kendaraan (sepeda motor dan mobil).

4.5 Perubahan Orientasi Bermukim terhadap Struktur Ruang dan Potensi Bencana Kota Padang

Pada sub bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu perubahan orientasi bermukim terhadap struktur ruang Kota Padang dan kaitan dengan potensi bencana di Kota Padang. Sebagai langkah awal mengetahui perubahan tersebut, dilakukan tahapan untuk melihat perbedaan antara struktur ruang Kota Padang tahun 2008 (sebelum gempa) dengan struktur ruang tahun 2014 (setelah gempa). Setelah mengetahui perbedaan struktur ruang kota tahun 2008 dan 2014, peneliti selanjutnya melakukan *overlay* peta struktur ruang Kota Padang tahun 2014 dengan peta keinginan pindah guna melihat apakah keinginan pindah masyarakat memiliki pengaruh terhadap struktur ruang Kota Padang. Berikut adalah perbedaan struktur ruang Kota Padang tahun 2008 dengan struktur ruang Kota Padang tahun 2014.

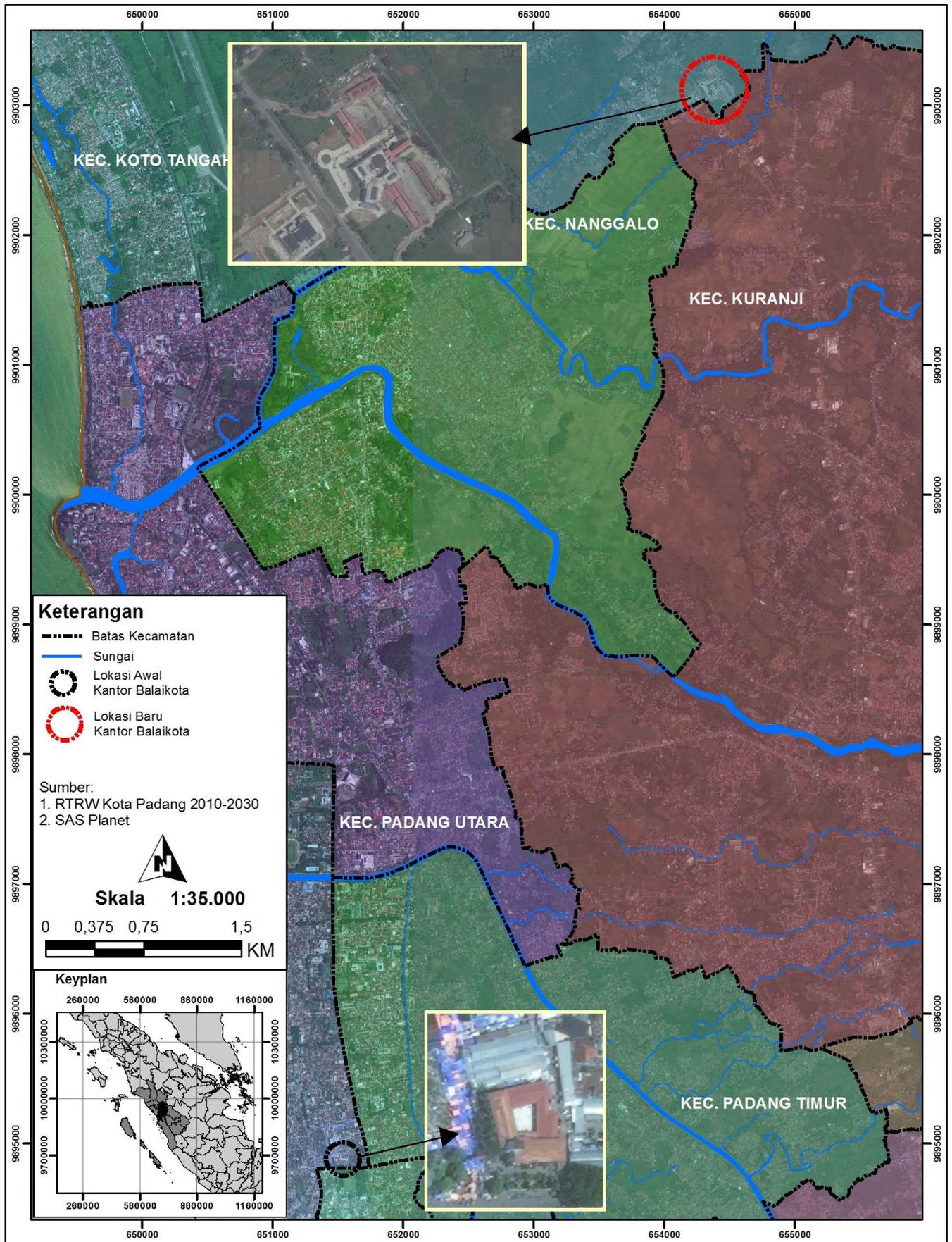
4.5.1 Analisis Evaluasi Struktur Ruang

Berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2008 dan Tahun 2014, pusat pelayanan skala Kota Padang hingga tahun 2014 masih berada di kawasan pusat lama yang mencakup kawasan Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan (**Gambar 4.24**). Hal ini dikarenakan keempat kawasan tersebut merupakan lokasi yang paling strategis dalam memenuhi kebutuhan fasilitas penduduk baik ekonomi, sosial maupun budaya. Selain itu juga kawasan tersebut berada di wilayah pinggir pantai yang mana kegiatan perdagangan dan jasa lebih terkonsentrasi di empat kecamatan tersebut.

Sub pusat pelayanan Kota Padang hingga tahun 2014 masih berada di kawasan yang sama yaitu Kawasan Aia Pacah, Lubuk Buaya, Bandar Buat dan Bungus (**Gambar 4.23**). Namun untuk sub pusat pelayanan kota di Kawasan Aia Pacah mengalami

penambahan fungsi kegiatan yaitu sebagai pusat pelayanan pemerintahan kota yang mengarah ke daerah timur (**Gambar 4.21**). Hal ini dikarenakan dampak dari bencana gempa bumi tahun 2009 telah menghancurkan pusat pemerintahan Kota Padang yang selama ini terkonsentrasi di Balai Kota Lama di Kecamatan Padang Barat (**Gambar 4.21**), sehingga menyebabkan pelayanan publik terganggu. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang berkewajiban membuat salah satu kebijakan dengan merelokasi pusat pemerintahan di Kawasan Terminal Regional Bingkuang Lama. Selain itu juga, pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tangah juga bertujuan untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami (RTRW Kota Padang, tahun 2010-2030).

Gambar 4.21 menunjukkan lokasi awal kantor Walikota Padang yang hanya berjarak ± 1 Km dari bibir pantai. Apabila dilihat dari peta kawasan rawan bencana tsunami (**Gambar 4.8**), kantor Walikota lama berada pada tingkat kerawanan tsunami yang cukup tinggi. Pasca gempa bumi tahun 2009, kantor Walikota Padang mengalami kerusakan bangunan. Kondisi ini tentu akan mengganggu pelayanan publik apabila tetap dipertahankan di kawasan tersebut. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang melakukan relokasi Balai Kota ke arah timur di Kawasan Aia Pacah. **Gambar 4.21** menunjukkan relokasi kantor Walikota Padang ke kawasan Aia Pacah yang berada di Kecamatan Koto Tangah yang dilintasi oleh jalan Bypass Kota Padang. Relokasi bangunan baru Kantor Walikota Padang memiliki jarak $\pm 5,4$ Km dari bibir pantai. Apabila ditinjau dari kawasan rawan bencana, Kantor Walikota Padang yang baru sudah berada di kawasan yang aman dari bencana gempa bumi dan tsunami.



Gambar 4.21 Peta Lokasi Kantor Pemerintahan Kota Padang

Selanjutnya untuk melihat perbedaan struktur ruang kota Padang sebelum dan setelah gempa berdasarkan RTRW dapat dilihat pada **Tabel 4.20**.

Tabel 4.20 Perbedaan Rencana Struktur Ruang Tahun 2008 dan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Kelurahan	Struktur Ruang 2008	Struktur Ruang 2010
1.	Padang Utara	Lolong Belanti	Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.	Pusat Pelayanan Kota pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.
2.	Padang Barat	Purus	Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.	Pusat Pelayanan Kota pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.
3.	Padang Timur	Simpang Haru	Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.	Pusat Pelayanan Kota pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.
4.	Padang Selatan	Mata Air	Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.	Pusat Pelayanan Kota pusat kegiatan perdagangan dan bisnis, kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan sosial-budaya, kegiatan pariwisata, rekreasi dan hiburan.
5.	Koto Tengah	Aia Pacah	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan transportasi (darat) regional (terminal), pusat pelayanan ekonomi (pasar ternak, pasar grosir, hotel, pertokoan), pusat kegiatan sosial-budaya (arena pekan raya, perumahan, <i>sport center</i> dan fasilitas sosial lainnya),	Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota, kawasan pusat olahraga, dan kawasan pendidikan tinggi, pusat pelayanan ekonomi (pasar ternak, hotel, pertokoan), pusat kegiatan sosial-budaya
6.	Koto Tengah	Lubuk Buaya	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi Kota Padang dan wilayah bagian utara (Kabupaten Padang Pariaman) dengan dukungan Sub-Terminal.	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi regional dengan dukungan Terminal Tipe A

No.	Kecamatan	Kelurahan	Struktur Ruang 2008	Struktur Ruang 2010
7.	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi Kota Padang dan wilayah bagian timur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Sub-Terminal.	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi Kota Padang dan wilayah bagian timur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B
8.	Bungus Teluk Kabung	Bungus	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan transportasi laut dalam skala nasional dan internasional, pusat pelayanan industri perikanan dan kemaritiman, pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi darat wilayah bagian selatan dengan dukungan Sub-Terminal.	Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pusat pelayanan transportasi laut dalam skala nasional dan internasional, pusat pelayanan industri perikanan dan kemaritiman, pusat pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi darat wilayah bagian selatan dengan dukungan Terminal Tipe B
9.	Bungus Teluk Kabung	Teluk Bayur	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan transportasi (laut) regional dan internasional.	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan transportasi (laut) regional dan internasional.
10.	Bungus Teluk Kabung	Sungai Pisang	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan pariwisata skala kota dan regional.	Pusat Pelayanan Lingkungan pusat pelayanan kegiatan pariwisata alam dan wisata agro
11.	Kec. Pauh	Limau Manis	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bentuk perguruan tinggi, pusat kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pusat kegiatan studi dan kajian sosial-budaya	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bentuk perguruan tinggi, pusat kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pusat kegiatan studi dan kajian sosial-budaya
12.	Lubuk Kilangan	Indarung	Pusat Pelayanan Lingkungan Sebagai perdaganga dan jasa dengan skala pelayanan regional khususnya pusat pelayanan ekonomi, kawasan pusat olahraga dan rekreasi, kawasan semen Padang dan pusat pelayanan transportasi kota dan wilayah bagian tomur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B.	Pusat Pelayanan Lingkungan Sebagai perdaganga dan jasa dengan skala pelayanan regional khususnya pusat pelayanan ekonomi, kawasan pusat olahraga dan rekreasi, kawasan semen Padang dan pusat pelayanan transportasi kota dan wilayah bagian tomur (Kabupaten Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B.
13.	Padang Selatan	Gunung Padang	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan dan kegiatan transportasi laut inter-insule	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai Pusat Kegiatan Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan dan kegiatan transportasi laut inter-insule

No.	Kecamatan	Kelurahan	Struktur Ruang 2008	Struktur Ruang 2010
13.	Kuranji		Pusat Pelayanan Lingkungan Sebagai perdaganga dan jasa dengan skala pelayanan regional	Pusat Pelayanan Lingkungan Sebagai perdaganga dan jasa dengan skala pelayanan regional
15.	Koto Tengah	Anak Air	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi
		Ketaping	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi	Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi

Sumber : RTRW Kota Padang Tahun 2008 dan Tahun 2014

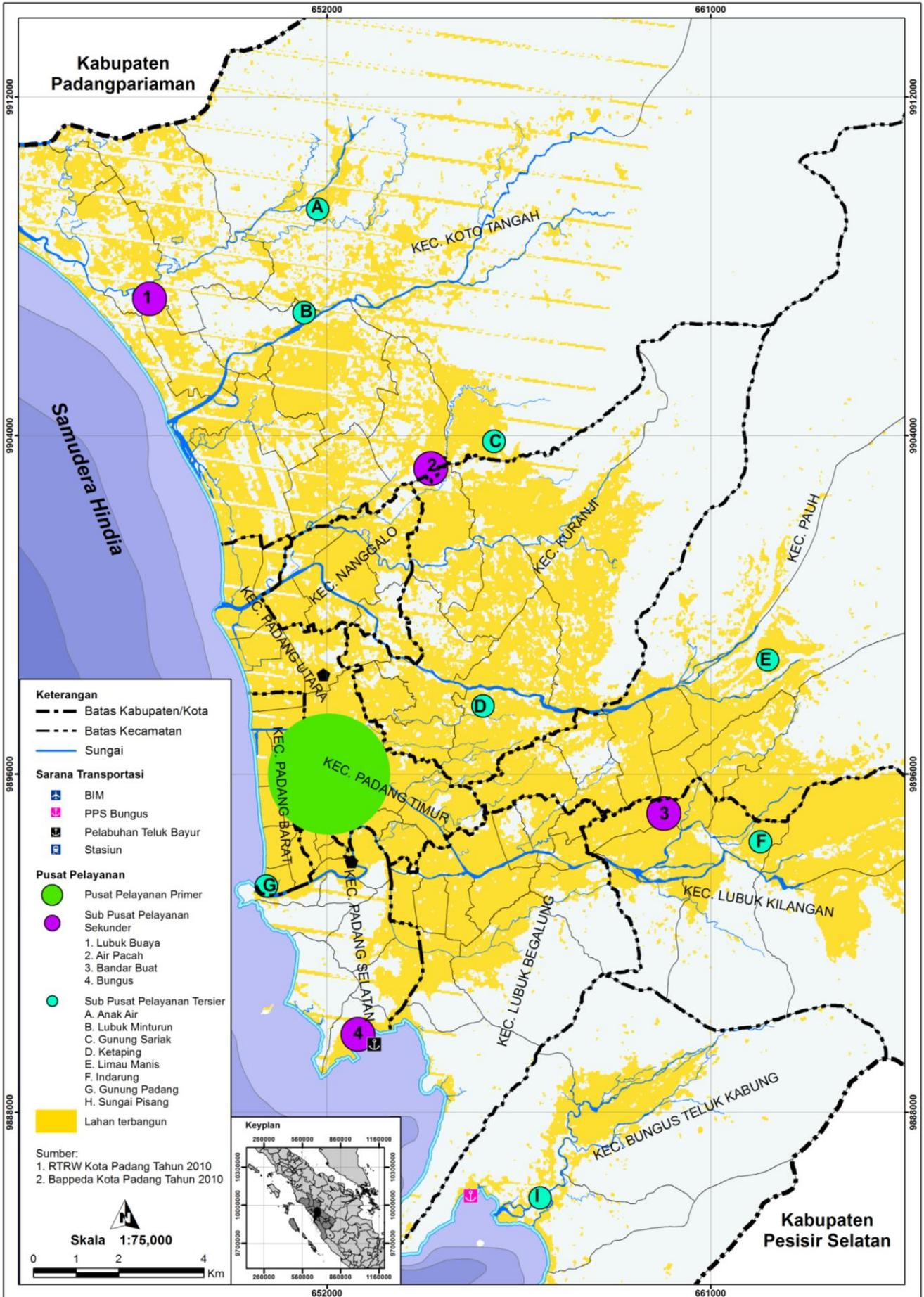
Berdasarkan hasil evaluasi perbandingan antara struktur ruang tahun 2008 (sebelum gempa) dan tahun 2014 (setelah gempa) pada **Tabel 4.20** dan **Gambar 4.23** menunjukkan bahwa:

1. Sistem pusat pelayanan kota masih berada di kawasan pusat lama yaitu Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur dan Padang Selatan.
2. Untuk Kawasan Aia Pacah mengalami penambahan fungsi kegiatan sebagai pusat pemerintahan kota. Pemindahan pusat pelayanan perkantoran akan mendorong perkembangan kegiatan penunjang kegiatan perkantoran seperti perdagangan dan jasa sehingga menimbulkan perkembangan pada pusat-pusat pelayanan di sekitar Kawasan Aia Pacah yaitu Kawasan Anak Air dan Ketaping (**Gambar 4.23**).
3. Kerusakan pasar raya di kawasan pusat lama mendorong perkembangan yang cukup signifikan pada pasar-pasar satelit yang terletak di pinggiran kota. Hal ini mengindikasikan terjadinya penyebaran kegiatan ekonomi pada simpu-simpul kawasan Aia Pacah, Lubuk Buaya, Bandar Buat, Indarung dan Ketaping (**Gambar 4.23**).
4. Untuk pusat pelayanan sistem transportasi perkotaan, pasca pemindahan pusat pemerintahan kota ke Kawasan Aia Pacah mempengaruhi arus pergerakan lalu lintas diantaranya:
 - a. Pasca gempa bumi terdapat rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer (sepanjang pantai) di Kota Padang yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau dengan Pelabuhan Teluk Bayur. Selain itu juga pengembangan jaringan jalan arteri sekunder (lingkar timur) yang menghubungkan jalan lingkaran timur ruas Bandar Buat - Limau Manis - Gunung Sarik - Aia Pacah - Lubuk Minturun - Jalan Padang Bypass (**Gambar 4.23**).

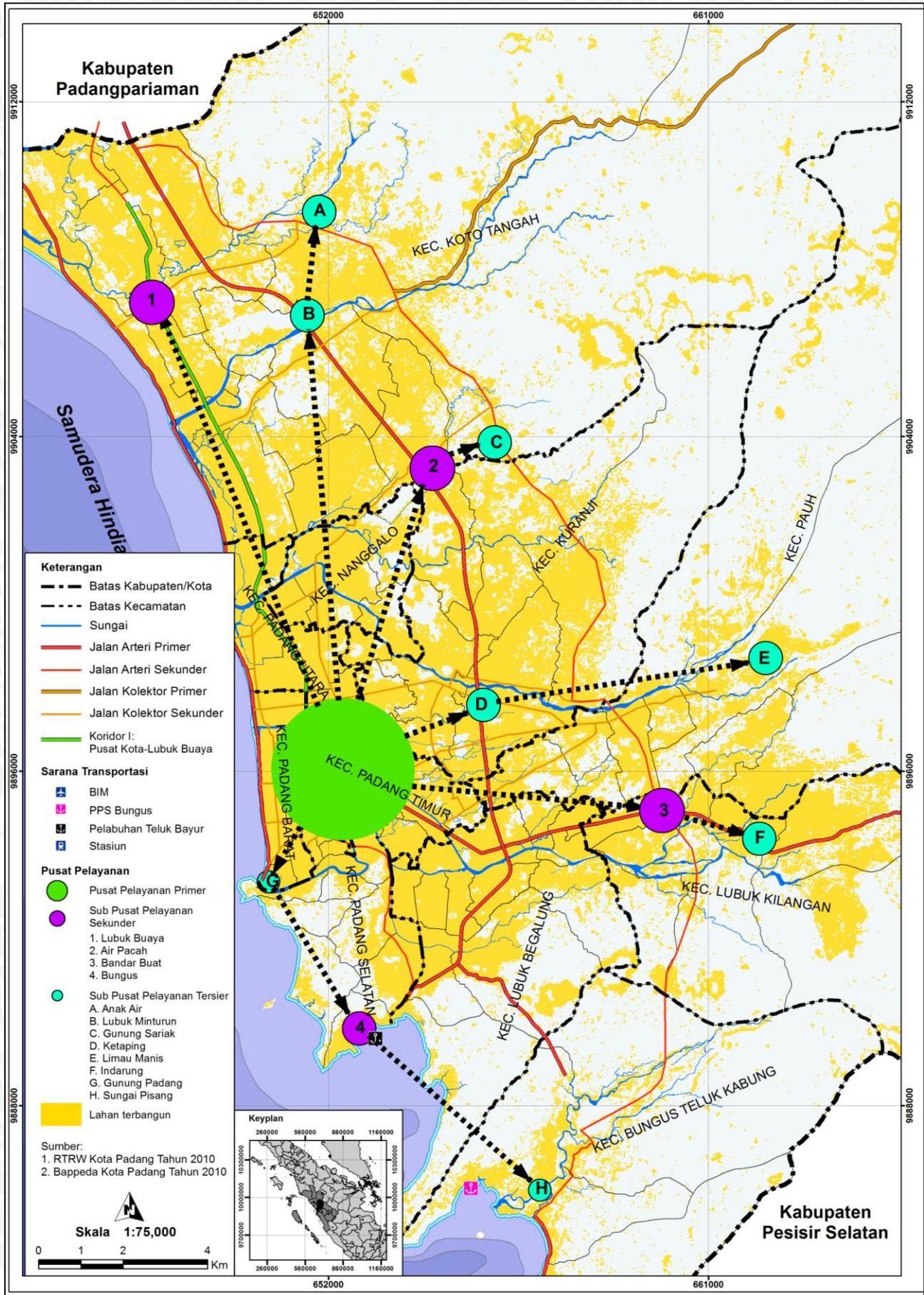
b. Penataan transportasi kota pasca pemindahan pusat pemerintahan kota ke Kawasan Aia Pacah dengan melakukan revitalisasi angkutan umum dengan dikembangkan angkutan umum massal berupa *Bus Rapid Transit* (BRT) di 5 (lima) koridor. Namun yang telah terealisasi hingga tahun 2014 untuk penataan angkutan BRT hanya pada koridor I (**Gambar 4.23**).

- a) Koridor I : Pusat Kota - Lubuk Buaya sepanjang 19 Km
- b) Koridor II : Pusat Kota - Indarung sepanjang 17 Km
- c) Koridor III : Bandara Minangkabau - Bypass - Teluk Bayur sepanjang 2 Km
- d) Koridor IV : Aia Pacah - Siteba - Pusat Kota sepanjang 18 Km
- e) Koridor V : Pusat Kota - Teluk Bayur sepanjang 8 Km

Gambar 4.22 menunjukkan peta struktur ruang Kota Padang tahun 2008. Pada tahun 2014 terdapat peningkatan fungsi kegiatan pada masing-masing pusat pelayanan sebesar 26%. Hal ini dibuktikan dari pertambahan jumlah penduduk yang tumbuh sekitar 1,14% per tahun pada tahun 2014 sebanyak 876.678 jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahun menyebabkan aktivitas penduduk semakin meningkat sehingga membutuhkan lahan terbangun untuk permukiman. Pada tahun 2014 kebutuhan akan lahan terbangun semakin meningkat sebesar 20.362,62 Ha. Selain itu juga terdapat penambahan pada masing-masing fasilitas umum seperti pendidikan, peribadatan dan kesehatan serta perluasan jaringan jalan sebesar 2.312,80 Km. Kondisi ini menyebabkan semakin meningkatnya pergerakan masyarakat Kota Padang khususnya pada sistem pusat pelayanan yang berada di kawasan pinggiran. Berikut adalah **Gambar 4.22** dan **Gambar 4.23** menunjukkan peta struktur ruang Kota Padang tahun 2008 dan peta struktur ruang Kota Padang tahun 2014.



Gambar 4.22 Peta Struktur Ruang Tahun 2008



Gambar 4.23 Peta Struktur Ruang Tahun 2014

4.5.2 Perubahan Orientasi Bermukim terhadap Struktur Ruang Kota Padang dan Potensi Bencana

Sehubungan dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan kota ke Kawasan Aia Pacah maka diikuti dengan keinginan pindah masyarakat dari pusat kota lama ke kawasan tersebut (Prasetio, *et. al.*, 2012). Hal ini dikarenakan Kawasan Aia Pacah selain dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kota Padang, juga diproyeksikan sebagai salah satu pusat kota baru, yang nantinya diharapkan mampu mendorong perkembangan wilayah sekitarnya (RTRW Kota Padang, Tahun 2010-2030). Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, terdapat lima kecamatan yang dijadikan tujuan pindah masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan tsunami yaitu Kecamatan Koto Tengah sebanyak 17,62% masyarakat, Kecamatan Kuranji sebanyak 7,33% masyarakat, Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 5,84% masyarakat, Kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak 6,24% masyarakat dan Kecamatan Pauh sebanyak 5,49% masyarakat (**Tabel 4.21**).

Berdasarkan hasil analisis evaluasi struktur ruang Kota Padang Tahun 2008 dan Tahun 2014, menunjukkan bahwa orientasi bermukim masyarakat di Wilayah Pantai Barat Kota Padang masih berada pada pola dan struktur ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 (**Gambar 4.24**). Hal ini dikarenakan bahwa struktur ruang Kota Padang sebelum dan setelah gempa masih pada fungsi kegiatan yang sama hanya saja mengalami peningkatan dan perkembangan di Kawasan Aia Pacah, Anak Air dan Ketaping. Perubahan orientasi bermukim masyarakat akan mempengaruhi kegiatan di lokasi yang menjadi pilihan diantaranya terhadap lahan-lahan pertanian dan kebutuhan sarana dan prasarana serta peningkatan fungsi kegiatan di lokasi keinginan pindah yang baru. Di satu sisi adanya peningkatan dan perkembangan fungsi kegiatan di lokasi keinginan pindah yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan dan Kecamatan Pauh akan memberikan dampak positif bagi struktur ruang Kota Padang seperti pusat-pusat pelayanan tidak lagi terkonsentrasi di pusat kawasan lama sehingga akan terjadi pemerataan. Namun apabila ditinjau dari kawasan yang rawan akan bencana (**Gambar 4.24**), keinginan pindah masyarakat pasca bencana gempa bumi tahun 2009 dan diseminasi peta rawan tsunami menimbulkan permasalahan baru karena mengarah ke kawasan bencana lainnya seperti gempa bumi, longsor dan banjir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ruang Kota Padang belum mengadopsi kerawanan bencana dengan baik, karena struktur ruang seharusnya mengakomodasi potensi bencana seperti yang tercantum pada PERMEN PU No.21/PRT/M/2007 bahwa “Perencanaan struktur ruang harus

mempertimbangkan daya dukung lingkungan, tingkat kerawanan, fungsi kawasan dan tingkat pelayanan dari unsur-unsur pembentuk struktur tersebut". Selain itu juga dikarenakan pada saat sekarang ini sedang dilakukan revisi pada RTRW Kota Padang.

Tabel 4.21 menunjukkan lokasi keinginan pindah masyarakat yang mengarah ke kawasan rawan bencana lainnya. Dari total 41,79% masyarakat (**Tabel 4.21**) yang ingin pindah, terdapat sebanyak 18,64% berada di lokasi keinginan rawan bencana gempa bumi, longsor dan banjir. Sedangkan 23,11% masyarakat sudah berada pada lokasi keinginan pindah yang aman dari bencana di Kota Padang. Hal ini ditunjukkan pada **Gambar 4.24** yang menunjukkan bahwa orientasi bermukim ke Kecamatan Koto Tengah berada di kawasan yang tidak rawan bencana di Kota Padang.

Tabel 4.21 Lokasi Pindah

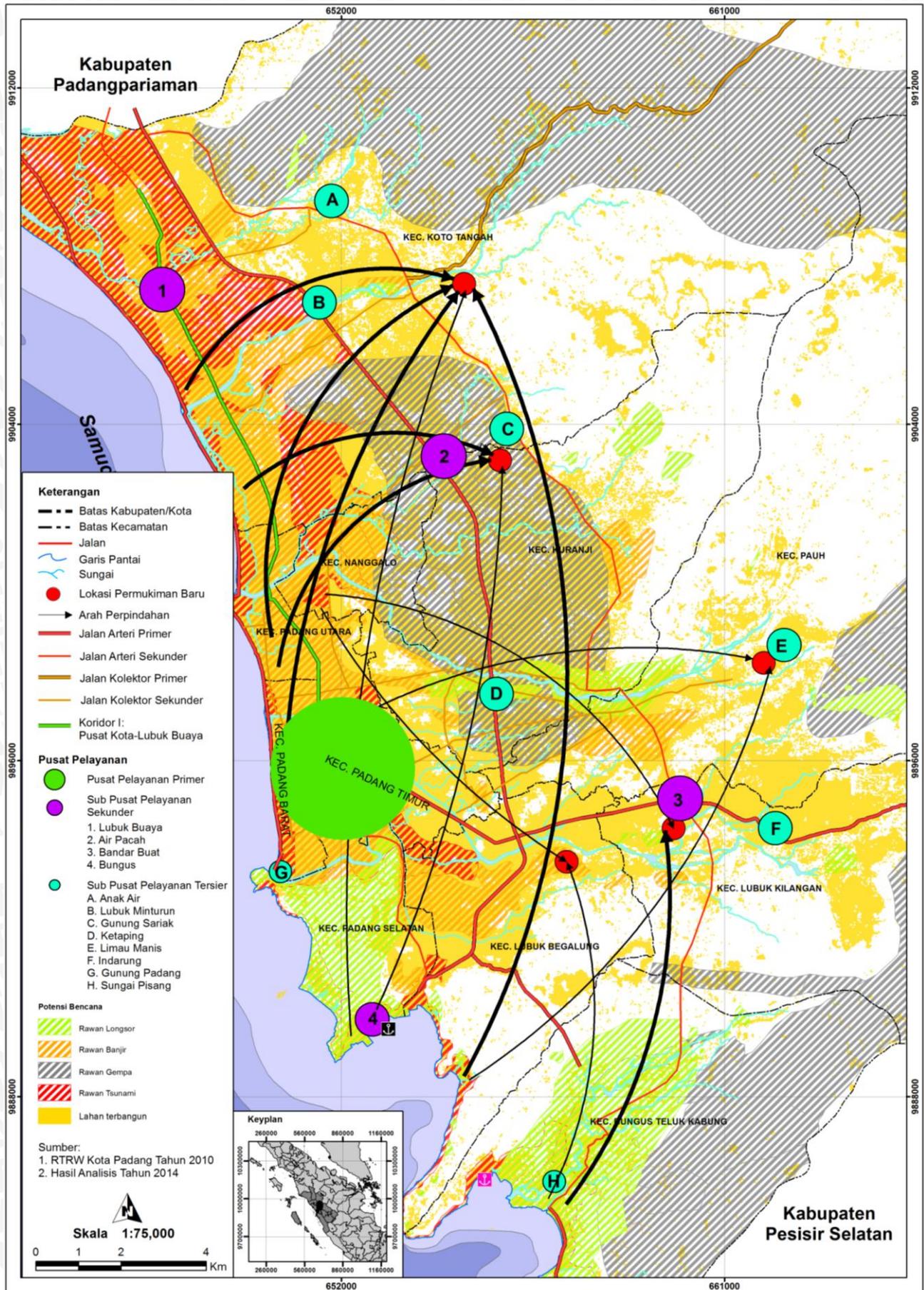
No	Asal Masyarakat (Kecamatan)	Lokasi Pindah (Kecamatan)									
		Koto Tengah		Kuranji		Lubuk Begalung		Lubuk Kilangan		Pauh	
		Jumlah (%)	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1.	Padang Utara	2,57	Aman	2,57	Gempa	0,36	Banjir	0	-	1,1	Aman
2.	Padang Barat	6,98	Aman	0	-	1,1	Banjir	1,47	Longsor	1,83	Aman
3.	Bungus Teluk Kabung	0,36	Aman	0,73	Gempa	1,83	Banjir	2,2	Longsor	0	-
4.	Padang Selatan	0,73	Aman	0	Gempa	0,36	Banjir	0	-	0	-
5.	Lubuk Begalung	2,57	Aman	0	-	0,36	Banjir	0	-	1,83	Aman
6.	Nanggalo	0	-	0	-	1,47	Banjir	1,47	Longsor	0	Aman
7.	Koto Tengah	4,41	Aman	3,3	Gempa	0,36	Banjir	1,1	Longsor	0,73	Aman
TOTAL		17,62%		5,84%		5,84%		6,24%		5,49%	

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa lokasi keinginan pindah yang baru tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena mereka masih berada di lokasi dengan risiko bencana gempa bumi, banjir dan longsor. Diseminasi daerah rawan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Lembaga Siaga Bencana seharusnya dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua jenis bencana di Kota Padang. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kota Padang lebih paham dengan bencana-bencana di Kota Padang. Selain itu agar tidak menimbulkan ketidaktepatan struktur ruang Kota Padang 2014 terhadap potensi bencana di Kota Padang maka arahan terhadap orientasi bermukim

masyarakat harus disesuaikan dengan peraturan terkait kebencanaan agar orientasi bermukim masyarakat terhadap struktur ruang dapat tanggap bencana:

1. Masyarakat dengan orientasi bermukim ke Kecamatan Kuranji akan menimbulkan permasalahan baru karena mereka masih berada di lokasi yang rawan gempa bumi. Disamping itu keinginan pindah akan berdampak pada peningkatan kegiatan budidaya di Kecamatan Kuranji. Berdasarkan pusat pelayanan, Kecamatan Kuranji merupakan pusat pelayanan lingkungan dengan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional. Oleh karena itu pengembangan kegiatan dan infrastruktur di Kecamatan Kuranji harus disesuaikan dengan pedoman struktur ruang kawasan rawan gempa dengan tipe A yaitu kawasan berlokasi jauh dari sesar yang rentan terhadap gempa yang mana pengembangan kegiatan di kawasan rawan gempa dapat dibangun dengan syarat (PERMEN PU No. 21 Tahun 2007)
 - a. Diizinkan untuk kegiatan permukiman dengan syarat pola permukiman dapat mengelompok dan menyebar serta membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa
 - b. Diizinkan untuk kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa dan pemerintahan dengan syarat konstruksi bangunan tahan gempa
2. Masyarakat dengan orientasi bermukim ke Kecamatan Lubuk Begalung berada di lokasi yang rawan bencana banjir. Apabila dilihat pusat pelayanan, Kecamatan Lubuk Begalung mencakup kawasan sub pusat pelayanan sekunder Kawasan Bandar Buat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian) dan pusat pelayanan transportasi Kota Padang. Oleh karena itu masyarakat yang ingin pindah ke Kecamatan Lubuk Begalung harus merancang bangunan rumah tahan banjir (material tahan air dan fondasi kuat) dan dibuat bertingkat. Sedangkan untuk pembangunan fasilitas umum harus kedap air (PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2006).
3. Masyarakat dengan orientasi bermukim ke Kecamatan Lubuk Kilangan berada pada risiko rawan longsor. Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan sub pusat pelayanan sekunder Kawasan Bandar Buat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian) dan pusat pelayanan transportasi Kota Padang. Dengan memperhatikan kegiatan di Kawasan Bandar Buat, maka orientasi bermukim masyarakat harus mendirikan bangunan dengan fondasi menyatu yang kuat dan melakukan pemadatan tanah disekitar perumahan (PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2006).



Gambar 4.25 Peta Tanggap Bencana di Kota Padang

